



Pemerintah Kota Bima
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

**DUKCAPIL GO
DIGITAL**

ZONA INTEGRITAS
NO KORUPSI



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024



GET IT ON
Google play
AYO SEGERA AKTIVASI !
IKD
IDENTITAS
KEPENDUDUKAN
DIGITAL



dis
dukcapil
KOTA BIMA



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA BIMA TAHUN 2024



**Disusun Oleh:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bima
2025**

Kata Pengantar



Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 guna peningkatan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan di Kota Bima. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2024 merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kota Bima pada tahun 2024.

Sumber utama data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2024 adalah Data Konsolidasi Bersih status 31 Desember 2024.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi penduduk, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Bima pada khususnya dan penduduk Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 ini.



Kota Bima, November 2025
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Hj. MARIAMAH, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013

Daftar Isi

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3



BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BIMA	5
A. Kondisi Geografis Kota Bima.....	5
B. Kondisi Demografis Kota Bima.....	10
C. Gambaran Ekonomi Kota Bima	11
D. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.....	14
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan	14
2. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
3. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.....	16
BAB III SUMBER DATA	23
BAB IV KOMPONEN KEPENDUDUKAN	25
A. Kuantitas Penduduk.....	25
1. Komposisi dan Persebaran Penduduk	25
2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan	30
3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	32
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	35
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	35
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Sosial.....	48

3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Keluarga	65
4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	88
5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian.....	91
BAB V KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK	96
A. Tingkat Kesehatan Penduduk	97
1. Aspek Kelahiran.....	98
2. Aspek Kematian.....	102
3. Sosial	107
B. Aspek Pendidikan	111
C. Aspek Ekonomi	114
BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	129
A. Kepemilikan Kartu Keluarga	130
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	133
C. Penerbitan Akta.....	140
D. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak.....	152
E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	153

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	156
A. Kesimpulan	156
1. Aspek Kuantitas	156
2. Aspek Kualitas	157
3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan	158
4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan.....	159
B. Implikasi Kebijakan	160



Daftar Tabel

Tabel II.1 Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan	8
Tabel II.2 Keadaan Geografi Kota Bima.....	10
Tabel II.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima (Persen).....	12
Tabel II.4 PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima (Milyar Rupiah)	13
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Barat.....	27
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Timur	27
Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Asakota	28
Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Raba.....	28
Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Mpunda	29
Tabel IV.7 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan.....	30
Tabel IV.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan.....	34

Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	36
Tabel IV.10 Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2024	39
Tabel IV.11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bima Tahun 2024.....	40
Tabel IV.12 Persentase Kumulatif Penduduk Kota Bima menurut Kelompok Umur.....	43
Tabel IV.13 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) Menurut Kecamatan.....	45
Tabel IV.14 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) menurut Kelompok Umur	47
Tabel IV.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	49
Tabel IV.16 Jumlah Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD	51
Tabel IV.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin	52
Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Kecamatan	53
Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan.....	54
Tabel IV.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	55
Tabel IV.21 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan	57

Tabel IV.22 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan.....	58
Tabel IV.23 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel IV.24 Jumlah Perempuan (Usia 15-49 Tahun) menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2024.....	62
Tabel IV.25 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan.....	63
Tabel IV.26 Angka Perceraian Umum per Kecamatan	64
Tabel IV.27 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan.....	67
Tabel IV.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga.....	68
Tabel IV.29 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan	70
Tabel IV.30 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Barat	71
Tabel IV.31 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Timur.....	72
Tabel IV.32 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Asakota.....	73
Tabel IV.33 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Raba.....	73
Tabel IV.34 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Mpunda	74

Tabel IV.35 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	76
Tabel IV.36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan	77
Tabel IV.37 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan.....	80
Tabel IV.38 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan.....	81
Tabel IV.39 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
Tabel IV.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	89
Tabel IV.41 Jumlah Penduduk Wajib Belajar yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD	91
Tabel IV.42 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan	92
Tabel IV.43 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan	93
Tabel IV.44 Jumlah Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun) yang Sudah Kawin dan Melahirkan Tahun 2024.....	95
Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Bima Tahun 2024.....	98
Tabel V.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di rinci menurut Kesertaan KB per Kecamatan	100
Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan.....	100

Tabel V.4 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita.....	103
Tabel V.5 Jumlah Kematian Ibu (yang dilaporkan) dirinci per kecamatan	104
Tabel V.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi (yang dilaporkan) dirinci per Kecamatan.....	104
Tabel V.7 Jumlah Bayi di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024	105
Tabel V.8 Jumlah Anak Balita, dan Balita di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024.....	105
Tabel V.9 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (yang dilaporkan) di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024	106
Tabel V.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirinci per Kecamatan Tahun 2024	107
Tabel V.11 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng berdasarkan Data Terpadu FM-OTM Kota Bima Tahun 2023.....	108
Tabel V.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Menerima Paket Sandang.....	108
Tabel V.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.....	109
Tabel V.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	109

Tabel V.15 Jumlah Penyandang Disabilitas	111
Tabel V.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Bima, 2022 dan 2023.	112
Tabel V.17 Angka Partisipasi Jenjang TK, KB/PAUD, SD, dan SMP di Kota Bima Tahun Pelajaran 2023/2024.....	113
Tabel V.18 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur.....	115
Tabel V.19 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja	121
Tabel V.20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Bukan Angkatan Kerja.....	122
Tabel V.21 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.....	122
Tabel V.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Total Angkatan Kerja dan Total Bukan Angkatan Kerja.....	123
Tabel V.23 Jumlah Penduduk Usia Kerja.....	123
Tabel V.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	124
Tabel VI.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kelurahan	131
Tabel VI.2 Jumlah dan Capaian Perekaman KTP Elektronik Per Kelurahan	134
Tabel VI.3 Jumlah dan Capaian Pencetakan KTP Elektronik per Kelurahan	137

Tabel VI.4 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir per Kelurahan	141
Tabel VI.5 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun per Kelurahan.....	143
Tabel VI.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian per Kecamatan.....	146
Tabel VI.7 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan per Kelurahan	147
Tabel VI.8 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perceraian per Kelurahan.....	150
Tabel VI.9 Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan & Pengangkatan Anak	152
Tabel VI.10 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kelurahan	154



Daftar Gambar

Gambar II.1 Peta Wilayah Kota Bima	7
Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan	26
Gambar IV.2 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	32
Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Bima.....	38
Gambar IV.4 Grafik Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2022	41
Gambar IV.5 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk.....	42
Gambar IV.6 Grafik Rasio Jenis Kelamin.....	46
Gambar IV.7 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	56
Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan.....	71
Gambar IV.9 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan.....	78
Gambar IV.10 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perjalanan bangsa dalam mencapai tujuannya, yakni menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan pembangunan akan berhasil apabila aspek-aspeknya diperhatikan dan diperhitungkan. Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan, sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi tentang kondisi dan karakteristik penduduk Kota Bima, untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Bima.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2024 yakni untuk menyajikan data kependudukan serta memberikan gambaran kondisi, perkembangan, dan proses kependudukan Kota Bima Tahun 2024. Secara umum, Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan tolak ukur kinerja pembangunan daerah dan penentuan target kinerja pembangunan, sedangkan secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2024 dimanfaatkan sebagai rujukan data untuk:

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kota;
2. Perencanaan kebijakan kependudukan daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
3. Penentuan target kinerja dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program-program pembangunan dalam rangka usaha penanggulangan tingkat kemiskinan daerah;
4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial masyarakat;
5. Pengembangan kelembagaan dalam partisipasi pembangunan masyarakat;
6. Penelitian lembaga dan Mahasiswa dalam mencapai tujuannya.

C. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bima 2024 memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data :

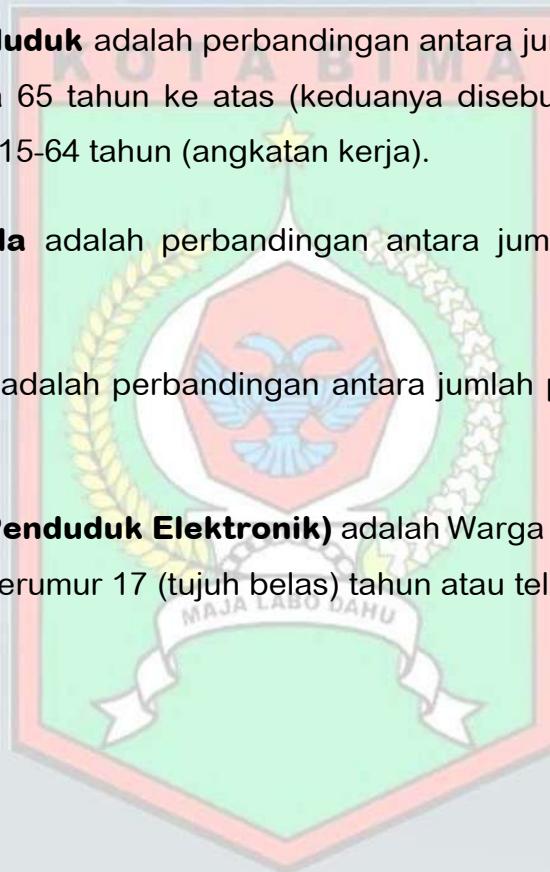
1. Kuantitas penduduk meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, dan penduduk menurut demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial;
3. Mobilitas (Migrasi) penduduk baik migrasi keluar maupun migrasi masuk;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP-el, KIA, dan Akta-Akta.

D. Pengertian Umum

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Bima.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk Kota Bima.
3. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkesinambungan.
4. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan, dan prospek kependudukan.

6. **Pendaftaran penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
7. **Pencatatan sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
8. **Peristiwa kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. **Peristiwa penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, pindah, datang, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah datang tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang layak, berbudaya, dan berkepribadian.
12. **Mobilitas penduduk** adalah perpindahan keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

13. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.
14. **Rasio Jenis Kelamin** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.
15. **Rasio Ketergantungan Penduduk** adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).
16. **Rasio Ketergantungan Muda** adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.
17. **Rasio Ketergantungan Tua** adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.
18. **Wajib KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)** adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.



BAB II

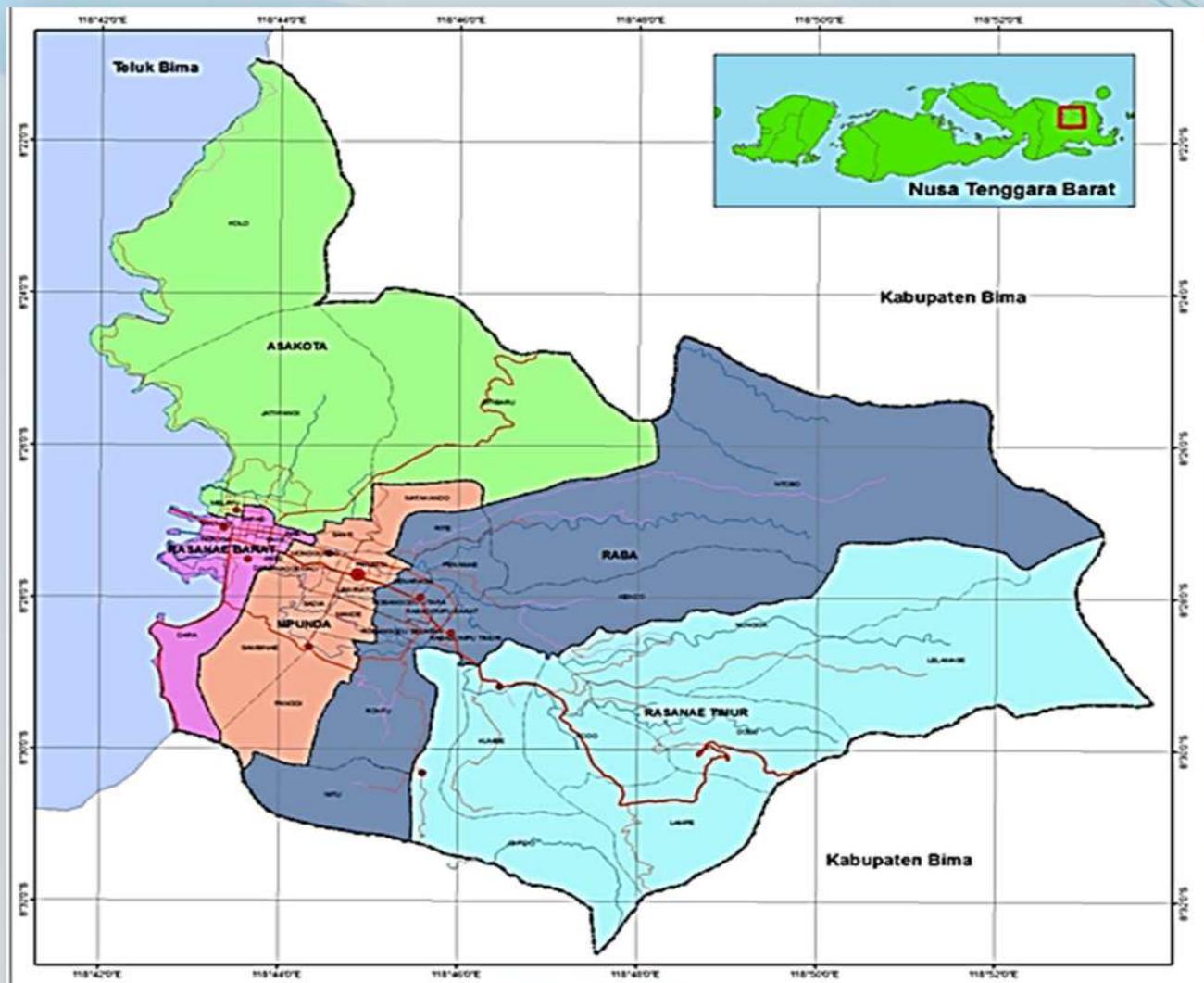
GAMBARAN UMUM KOTA BIMA

A. Kondisi Geografis Kota Bima

Kota Bima yang dikenal sebagai “Kota Tepian Air” merupakan kota yang diuntungkan secara geografis, selain berada di ujung timur Pulau Sumbawa, Kota Bima juga memiliki satu pelabuhan laut yaitu PT. Pelindo III. Selain itu, pelabuhan Sape dan Bandar Udara Muhammad Salahudin juga merupakan penunjang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Posisi strategis Kota Bima dapat menunjang perwujudan kota ini sebagai kota pusat perdagangan barang dan jasa.

Secara geografis Kota Bima merupakan salah satu Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Bagian Timur Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 222,25 km² dan berada pada 118° 41' – 118°,48' Bujur Timur dan 8°,30'- 8°,20' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Sebelah Utara | : | Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima; |
| Sebelah Timur | : | Kecamatan Wawo Kabupaten Bima; |
| Sebelah Selatan | : | Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; |
| Sebelah Barat | : | Teluk Bima. |



Gambar II.1 : Peta Wilayah Kota Bima

B. Kondisi Geomorfologi Kota Bima

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi berdasarkan morfometri dan morfogenesa, dapat dibedakan menjadi 4 satuan geomorfologi yaitu:

1. *Satuan Geomorfologi Dataran Fluvial*

Terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan Kota Bima, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Rabangodu, Rabadompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

2. *Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai*

Terhampar luas pada bagian barat Kota Bima, meliputi daerah Tanjung, Melayu, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

3. *Satuan Geomorfologi Bergelombang Lemah Denudasional*

Terhampar luas pada bagian tengah Kota Bima, meliputi daerah Doro Oimbo, Doro Oi Si'i, Doro Jati Oi Fo'o, Nitu, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 6%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batu gamping dan batu pasir.

4. *Satuan Geomorfologi Bergelombang Lemah – Kuat Vulkanik*

Terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan Kota Bima, meliputi daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa, dan sekitarnya. Kemiringan lereng rata-rata sebesar 13%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.

C. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan kategori iklim, Kota Bima memiliki iklim Sabana Tropis (Aw). Tingkat curah hujan tahunan Kota Bima berkisar antara 1.000 – 2.000 mm per tahun dengan jumlah curah hujan bervariasi antara 80 – 140 hari hujan per tahun. Sementara itu, matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 71,1%. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Bima sebesar 21°C sampai 32,8°C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan suhu berkisar 37,2°C sampai 38°C. Hal ini menyebabkan Kota Bima ditetapkan sebagai salahsatu kota terpanas di Indonesia.

Sumber daya Alam baik yang terkandung di daratan, sungai, maupun dilaut merupakan potensi ekonomi yang besar. Pengelolaan dan peningkatan sumber daya secara efisien dan efektif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kependudukan.

Kota Bima memiliki banyak potensi sebagaimana kota dan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat seperti potensi pariwisata, perikanan, kelautan, kehutanan, pertanian, dan industri. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan adalah sektor perikanan. Sebagai contoh, Kelurahan Dodu, Ntobo, Nungga, dan Mande dapat dikembangkan menjadi kawasan sentral industri ikan air tawar. Beberapa kelurahan tersebut memiliki potensi dan sumber mata air yang melimpah untuk menjadi sentral industri ikan air tawar. Jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan antara lain manila, karper, mujair, lele, dan lain-lain. Potensi air yang melimpah pada kawasan tersebut harus dapat diberdayagunakan. Pemerintah Kota Bima melalui kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUBE), melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan, memberikan bantuan bibit ikan, dan memberikan dana stimulan modal usaha.

Selain itu, masyarakat di kawasan potensial tersebut diberikan pandangan dan pemahaman agar dapat memanfaatkan potensi air yang ada untuk pembudidayaan ikan air tawar. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup, menyuplai dan memenuhi kebutuhan ikan air tawar masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bima.

Di Kota Bima terdapat berbagai sumber daya alam (SDA), diantaranya yang menjadi andalan adalah sebagai berikut :

- Pertanian
- Perdagangan.
- Wisata Pantai dan Wisata Alam.

Rencana tata ruang Kota Bima yang berwawasan lingkungan harus dijadikan pedoman terpadu Pembangunan agar tatanan lingkungan lingkup dan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna, berhasil guna secara berkelanjutan. Berhubungan dengan rencana tata ruang tersebut khususnya yang berkaitan dengan pembangunan perlu diperhatikan hal-hal antara lain :

- Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih fungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun;
- Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi perkembangan kependudukan.

D. Kondisi Demografis Kota Bima

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2024 adalah 165.113 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 82.338 jiwa dan perempuan 82.775 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Bima sebesar 99,47, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan, meskipun secara nasional penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Kondisi Kota Bima pada tahun 2022 mengalami “Bonus Demografi” dimana usia produktif jumlahnya melebihi dari usia tidak produktif dengan rentang usia produktif yaitu 15 – 64 tahun. Penduduk Kota Bima pada tahun 2024 pada rentang usia produktif sejumlah 111.984 jiwa.

Pada kondisi “Bonus Demografi” yang sudah terjadi sejak tahun 2022 harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan ekonomi. Melimpahnya tenaga kerja merupakan peluang emas untuk menggenjot roda perekonomian sehingga sektor-sektor ekonomi riil terdongkrak memiliki peningkatan daya saing. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba yaitu sebanyak 41.104 jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu sebanyak 20.328 jiwa. Angka kepadatan penduduk Kota Bima cukup tinggi yaitu mencapai 743 jiwa/km², sehingga apabila laju pertambahan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Bima akan menjadi semakin padat.

E. Gambaran Ekonomi Kota Bima

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Berikut tabel Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima Tahun 2019-2023. Pemahaman sektor andalan adalah sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan data perkembangan PDRB per sektor, dapat dihitung besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bima yang mengandalkan sektor 1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; 4) Transportasi dan Pergudangan; dan 5) Konstruksi.

Tabel II.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kota Bima (Persen)

Kategori	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,68	13,43	13,74	14,03	13,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0,36	0,35	0,38	0,39	0,40
C	Industri Pengolahan	2,95	2,94	3	3,08	2,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,20	0,20	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8,24	8,33	9,11	8,61	9,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,04	25,40	24,60	24,64	25,13
H	Transportasi dan Pergudangan	9,21	9,11	8,51	8,46	10,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,51	3,52	3,01	3,05	3,09
J	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,75	1,78	1,75	1,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,60	2,72	2,50	2,49	2,35
L	Real Estate	5,21	5,39	5,39	5,52	5,25
M, N	Jasa Perusahaan	0,38	0,37	0,35	0,36	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,91	11,36	11,86	11,93	11,05
P	Jasa Pendidikan	7,87	7,93	8,44	8,48	7,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,39	3,39	3,48	3,37	3,16
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,71	3,76	3,61	3,63	3,66
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2023

Tabel II,4 PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bima (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	426,76	416,55	410,79	410,77	412,92
B	Pertambangan dan Penggalian	11,98	11,43	12,14	11,99	12,91
C	Industri Pengolahan	108,74	105,84	103,81	103,20	103,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,25	9,06	8,27	7,67	7,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,95	0,97	0,96	0,96	0,98
F	Konstruksi	276,49	262,18	284,10	266,80	305,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	796,68	739,34	711,18	695,71	740,10
H	Transportasi dan Pergudangan	304,52	289,34	263,95	260,35	326,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97,28	91,09	75,01	73,98	78,07
J	Informasi dan Komunikasi	73,22	69,85	67,97	64,64	56,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	80,45	78,87	73,37	73,36	71,96
L	Real Estate	170,82	164,10	157,37	155,58	153,60
M, N	Jasa Perusahaan	12,02	11,14	10,37	10,35	10,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289,51	282,05	283,97	279,44	280,51
P	Jasa Pendidikan	259,95	246,04	248,06	244,61	241,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,00	116,40	113,17	107,06	106,18
R, S, T, U	Jasa lainnya	130,48	124,17	114,64	112,75	119,91
Produk Domestik Regional Bruto		3.174,09	3.018,40	2.939,13	2.879,22	3.029,04

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2023

F. Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima merupakan lembaga pemerintah daerah yang memberikan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil berlokasi pada Jalan Sokarno Hatta No,2 Raba-Bima, Pelayanan yang diberikan yaitu terkait dengan dokumen pendaftaran penduduk (Kartu Keluarga, KTP-el, Pindah Datang, KIA) dan dokumen pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan/Pengesahan/Pengangkatan Anak,

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pelayanan

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bima merupakan salah satu wujud dari pelayanan publik yang secara operasional pelaksananya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil



2. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tertuang dalam Peraturan WaliKota Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- g. Penyelenggaraan sosialisasi;
- h. Pembinaan jabatan fungsional,

3. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang mempunyai *tagline* “Melayani dengan Penuh Keikhlasan” berusaha untuk selalu membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bima, Berikut adalah inovasi-inovasi dalam yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam rangka membahagiakan masyarakat:

A. Warda Warta (Wara Bidan Wara Akta) Ada Bidan Ada Akta

Untuk membantu mencapai target cakupan kepemilikan akta kelahiran, maka Dinas Dukcapil Kota Bima berinovasi membuat sebuah sistem layanan yang bernama WARDA WARTA (*wara bidan wara akta*) “ada bidan ada akta”, hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bidan seluruh Polindes se-Kota Bima, Inovasi ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran, baik akta kelahiran usia 0-17 tahun, maupun akta kelahiran di atas 17 tahun, sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan langsung oleh Bidan, Dokumen yang akan diterima pun tidak hanya akta kelahiran, tetapi disertai Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pemohon akta kelahiran bayi yang baru lahir, Dengan demikian, Layanan Inovasi Warda Warta adalah sebuah layanan penerbitan akta kelahiran yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan masyarakat,



Penyerahan Akta Kelahiran, Inovasi Warda Warta Ke Bidan Polindes Kelurahan Lelomose

Inovasi "WARDA WARTA" Dinas Dukcapil Kota Bima mendapatkan Juara Harapan 1 kategori umum, Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada pagelaran "Malam Apresiasi Inovasi Daerah Kota Bima" yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Bima,

B. Kartu Identitas Anak (KIA) Masuk Sekolah

Merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari, Di Kota Bima, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di beberapa mitra KIA, Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, misal: membuka tabungan, *check-in* pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya,



Dalam mewujudkan Pelayanan dengan Ikhlas dan Membahagiakan Masyarakat, Disdukcapil Kota Bima menandatangani PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan beberapa pihak swasta seperti **Outdoormu Adventure Store, Kolam Renang Bima Tirta, Bimbingan Belajar Prime Generation Cabang Kota Bima, Global Mart Kota Bima** yang mana warga Kota Bima yang menggunakan pelayanan dan fasilitas pihak swasta tersebut akan mendapatkan potongan harga, Ke depannya Disdukcapil Kota Bima bertekat untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi lain demi membahagiakan warga Kota Bima,

C. Lao Wa'a Tauma (LAWATA)

Inovasi "LAWATA" merupakan inovasi kerjasama dengan PT, POS Indonesia, Dengan hadirnya inovasi ini, PT, POS sebagai mitra dinas dukcapil akan mengantarkan dokumen kependudukan masyarakat ke seluruh wilayah kota Bima, Inovasi ini diambil dari nama Pantai di Kota Bima yaitu Pantai LAWATA,

LAWATA merupakan singkatan dari LAO WA'A TA UMA (Bahasa Bima) yang artinya Pergi Antar Sampai Rumah,



D. Lalapan Ikan (Layanan Langsung Pengaktivasian Identitas Kependudukan Digital)

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, KTP Elektronik ikut serta bertransformasi ke dalam bentuk digital, Permendagri No, 72 Tahun 2022 tersebut menjelaskan identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan,

Dengan *Identitas Kependudukan Digital* (IKD), masyarakat tidak perlu lagi menyimpan KTP dalam bentuk fisik, cukup menunjukkan *QR Code* yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi, Guna akselerasi penerapan penggunaan IKD bagi seluruh kalangan, Dinas Dukcapil Kota Bima menghadirkan Inovasi yang dikemas dalam “**LALAPAN IKAN**” yang merupakan singkatan dari **PELAYANAN LANGSUNG PENGAKTIVASIAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL**, Pelaksanaan Inovasi LALAPAN IKAN ini dengan cara membuka pelayanan mobile pada tiap-tiap OPD, kampus, dan tempat-tempat umum lainnya,



E. Seserahan Dinas Dukcapil Bagi Pasangan Baru Nikah (Handuk Basah)

HANDUK BASAH yang merupakan akronim dari **“Hadiyah Adminduk Bagi Pasangan Baru Sah Menikah”** adalah inovasi pelayanan jemput bola dikhususkan kepada warga yang baru melaksanakan pernikahan secara resmi dengan tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan dengan cepat,

Adapun paket layanan adminduk pada inovasi ini, kepada pasangan yang baru menikah tersebut akan mendapatkan 5 (Lima) produk dukcapil yaitu KK baru bagi pengantin, KTP baru bagi pengantin dengan status menikah, KK baru bagi kedua orangtua pengantin,

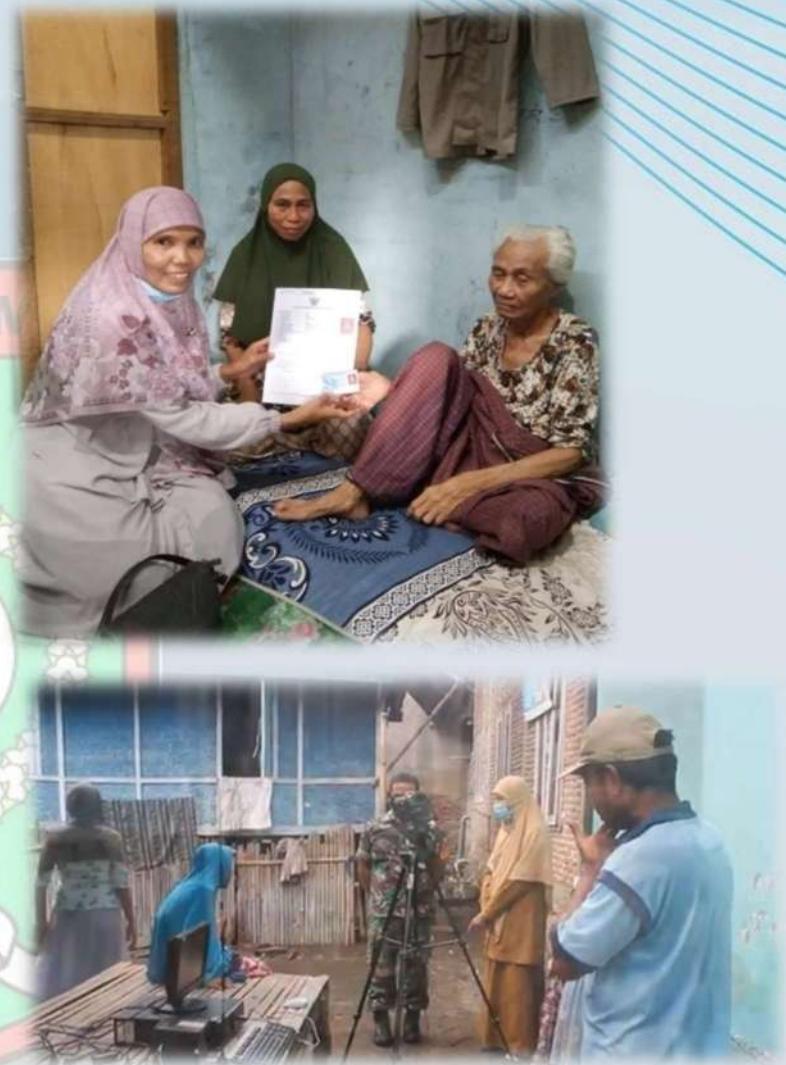
Dalam pelaksanaan Inovasi ini Dinas Dukcapil Kota Bima berkoordinasi dengan seluruh Kantor Urusan Agama di 5 (Lima) Kecamatan se Kota Bima untuk mendapatkan informasi warga yang akan melaksanakan pernikahan,



F. Pelayanan Penduduk Rentan (LADURENTA)

Inovasi Pelayanan Penduduk Rentan (LADURENTA)

merupakan pelayanan yang dilaksanakan dan diberikan khusus kepada seluruh penduduk rentan, baik itu warga lanjut usia (Lansia), penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pelayanan tersebut meliputi pelayanan perekaman biometrik KTP-EL, penyerahan KK, penyerahan biodata, dan penyerahan KTP-EL yang langsung dilaksanakan di masing-masing kediaman penduduk rentan, Dalam pelaksanaan pelayanan ini, sebelumnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAFDUK) mendapat pemberitahuan atau permintaan dari berbagai komponen seperti sanak famili, LSM, Babinkamtibmas dan Babinsa di setiap kelurahan yang kemudian akan ditugaskan pejabat fungsional bersama tim untuk terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan, Dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mendatangi rumah-rumah penduduk menggunakan Mobil Pelayanan yang sudah dilengkapi berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam proses perekaman maupun pencetakan dokumen kependudukan,



G. Spasiduk Rakit (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)

Sejak Tahun 2022, Dinas Dukcapil Kota Bima membangun kemitraan dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima, Inovasi kerja sama tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak,

Kerjasama yang dihadirkan tersebut yaitu penerbitan adminduk bagi bayi yang baru dilahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah, Produk dukcapil yang akan didapatkan yaitu Kartu Keluarga baru, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak,

Bagi Ibu yang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima, untuk mendapatkan dokumen adminduk yang baru tidak perlu repot melakukan pengurusan sendiri ke Kantor Dinas Dukcapil, Karena dengan adanya **Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit “SPASIDUK RAKIT”**, kepemilikan dokumen adminduk baru tersebut akan langsung diterima atau diserahkan oleh pihak Rumah Sakit,



BAB III

SUMBER DATA

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari data registrasi, non registrasi, dan lintas sektoral.

Data registrasi penduduk merupakan data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut diadministrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data non registrasi adalah data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial. Data lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati

kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang mempunyai tanggung-jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Konsolidasi Bersih diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dua kali dalam setahun. Dan untuk penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Bila ada perbedaan data antara Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan data di daerah, maka data DKB yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

Kerangka berpikir serta dasar metode analisis data dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2024 adalah:

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga jelas peristiwa kependudukan yang terjadi di wilayah;
2. Mengidentifikasi segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk menanganiinya;
3. Mengidentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk yang valid dan analisa untuk pembangunan daerah yang berwawasan aspek kependudukan.

BAB IV

KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

1. Komposisi dan Persebaran Penduduk

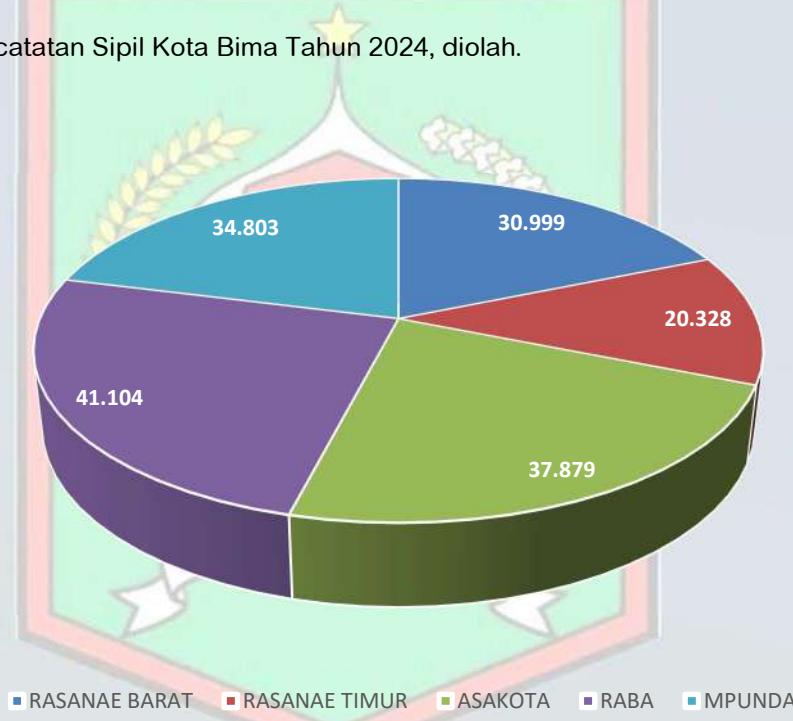
Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota. Kota Bima dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi jika tidak serius ditangani akan menjadi masalah yang krusial, apalagi jika jumlah ini dikaitkan dengan luas wilayah, maka permasalahan kepadatan penduduk di Kota Bima sangat risikan. Karena semakin padatnya suatu wilayah, maka akan berakibat tidak terpenuhinya fasilitas umum, padatnya daerah pemukiman dan timbulnya masalah sosial lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Bima didalam menyelesaikan permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi.

Pada dekade tujuh puluhan hampir setiap daerah menghadapi masalah yang sama yaitu besarnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah tidak meratanya penduduk disetiap daerah. Terutama antara lain daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah jumlah penduduk perlu diperhatikan karena penduduk sebagai sumber daya ekonomi, selain sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan objek bagi pembangunan.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	52.72.01	Rasanae Barat	15.463	18,78	15.536	18,77	30.999	18,77
2	52.72.02	Rasanae Timur	10.111	12,28	10.217	12,34	20.328	12,31
3	52.72.03	Asakota	19.095	23,19	18.784	22,69	37.879	22,94
4	52.72.04	Raba	20.384	24,76	20.720	25,03	41.104	24,89
5	52.72.05	Mpunda	17.285	20,99	17.518	21,16	34.803	21,08
Jumlah			82.338	100,00	82.775	100,00	165.113	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.



Gambar IV.1 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Barat

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.01	Rasanae Barat		15.463	100,00	15.536	100,00	30.999	100,00
1	1001	Paruga	2.643	17,09	2.664	17,15	5.307	17,12
2	1002	Nae	2.093	13,54	2.210	14,23	4.303	13,88
3	1003	Sarae	2.619	16,94	2.546	16,39	5.165	16,66
4	1004	Tanjung	3.297	21,32	3.244	20,88	6.541	21,10
5	1013	Pane	1.306	8,45	1.399	9,00	2.705	8,73
6	1014	Dara	3.505	22,67	3.473	22,35	6.978	22,51

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Rasanae Timur

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.02	Rasanae Timur		10.111	100,00	10.217	100,00	20.328	100,00
1	1004	Kumbe	1.994	19,72	2.006	19,63	4.000	19,68
2	1008	Lampe	826	8,17	858	8,40	1.684	8,28
3	1009	Dodu	1.673	16,55	1.705	16,69	3.378	16,62
4	1011	Nungga	1.307	12,93	1.290	12,63	2.597	12,78
5	1018	Kodo	1.113	11,01	1.170	11,45	2.283	11,23
6	1019	Oi Fo'o	1.183	11,70	1.151	11,27	2.334	11,48
7	1020	Lelamase	1.068	10,56	1.095	10,72	2.163	10,64
8	1021	Oimbo	947	9,37	942	9,22	1.889	9,29

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Asakota

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.03	Asakota		19.095	100,00	18.784	100,00	37.879	100,00
1	1001	Melayu	2.943	15,41	2.940	15,65	5.883	15,53
2	1002	Jatiwangi	3.950	20,69	3.874	20,62	7.824	20,66
3	1003	Jatibarу	3.175	16,63	3.046	16,22	6.221	16,42
4	1004	Kolo	3.268	17,11	3.176	16,91	6.444	17,01
5	1005	Jatibarу Timur	2.149	11,25	2.189	11,65	4.338	11,45
6	1006	Ule	3.610	18,91	3.559	18,95	7.169	18,93

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Raba

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.04	Raba		20.384	100,00	20.720	100,00	41.104	100,00
1	1001	Penaraga	2.593	12,72	2.690	12,98	5.283	12,85
2	1002	Rontu	1.695	8,32	1.696	8,19	3.391	8,25
3	1003	Penanae	2.172	10,66	2.154	10,40	4.326	10,52
4	1004	Kendo	819	4,02	824	3,98	1.643	4,00
5	1005	Ntobo	1.999	9,81	1.995	9,63	3.994	9,72
6	1006	Nitu	816	4,00	813	3,92	1.629	3,96
7	1007	Rabangodu Selatan	2.048	10,05	2.103	10,15	4.151	10,10
8	1008	Rabadompu Timur	1.866	9,15	1.967	9,49	3.833	9,33
9	1009	Rite	1.293	6,34	1.225	5,91	2.518	6,13
10	1010	Rabadompu Barat	2.619	12,85	2.766	13,35	5.385	13,10
11	1011	Rabangodu Utara	2.464	12,09	2.487	12,00	4.951	12,05

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kec. Mpunda

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.05	Mpunda		17.285	100,00	17.518	100,00	34.803	100,00
1	1001	Monggonao	2.072	11,99	2.064	11,78	4.136	11,88
2	1002	Sadia	1.920	11,11	1.963	11,21	3.883	11,16
3	1003	Santi	1.432	8,28	1.471	8,40	2.903	8,34
4	1004	Sambinae	1.834	10,61	1.843	10,52	3.677	10,57
5	1005	Penatoi	2.406	13,92	2.545	14,53	4.951	14,23
6	1006	Lewirato	1.015	5,87	981	5,60	1.996	5,74
7	1007	Mande	1.444	8,35	1.535	8,76	2.979	8,56
8	1008	Panggi	1.431	8,28	1.434	8,19	2.865	8,23
9	1009	Manggemaci	2.158	12,48	2.141	12,22	4.299	12,35
10	1010	Matakando	1.573	9,10	1.541	8,80	3.114	8,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan suatu wilayah. Secara umum penduduk Kota Bima yang terbagi pada 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan lebih banyak didominasi pada jenis kelamin perempuan, meskipun secara nasional penduduk Indonesia didominasi jenis kelamin laki-laki.

Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Raba yaitu sejumlah 41.104 jiwa yang terdiri dari 20.384 laki-laki dan 20.720 perempuan atau 24,89% dari total penduduk Kota Bima, disusul Kecamatan Asakota dengan 22,94%. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur yaitu sejumlah 20.328 jiwa dimana 10.111 laki-laki dan 10.217 perempuan atau 12,31% dari total penduduk Kota Bima.

Sedangkan untuk tingkat kelurahan, jumlah penduduk tertinggi di Kelurahan Jatiwangi dengan jumlah penduduk 7.824 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kelurahan Nitu dengan jumlah 1.629 jiwa. Sedangkan proporsi penduduk perempuan disetiap kecamatan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki, kecuali di kecamatan Asakota yang terdiri dari 19.095 laki-laki dan 18.784 perempuan.

2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk perkilometer persegi pada periode tahun tertentu.

Tabel IV.7 Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	n	%		
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.999	18,77	10,14	3.057
2	52.72.02	Rasanae Timur	20.328	12,31	64,07	317
3	52.72.03	Asakota	37.879	22,94	69,03	549
4	52.72.04	Raba	41.104	24,89	63,73	645
5	52.72.05	Mpunda	34.803	21,08	15,28	2.278
		Jumlah	165.113	100,00	222,25	743

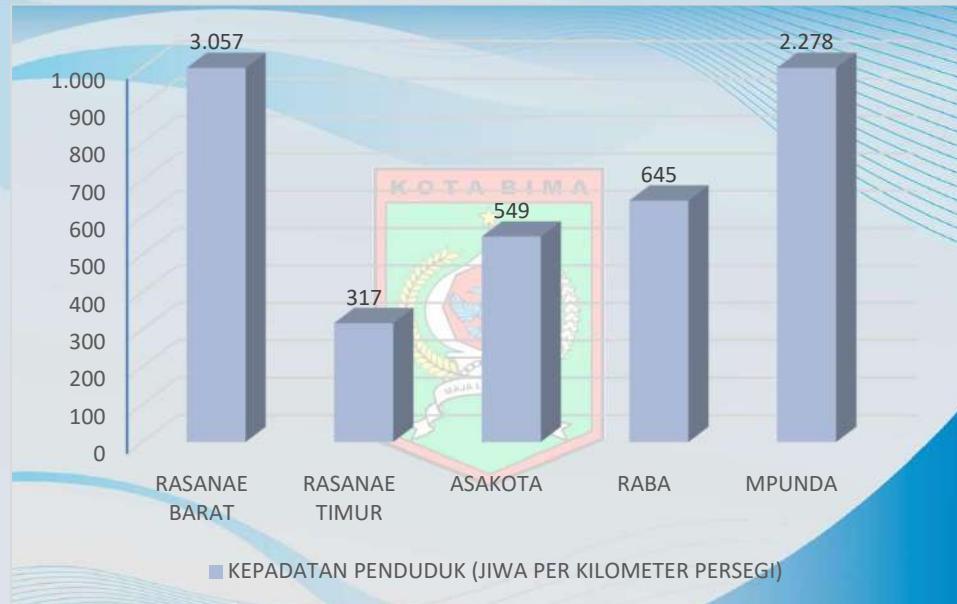
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Angka kepadatan penduduk Kota Bima adalah 743 artinya setiap km^2 dihuni oleh 743 jiwa. Ditinjau dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Bima dengan kepadatan mencapai 3.057 jiwa/ km^2 sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Rasanae Timur yaitu 317 jiwa/ km^2 .

Informasi kepadatan penduduk tiap daerah perlu diketahui untuk mengetahui gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu *tidak padat* dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, *kurang padat* dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, *cukup padat* dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan *sangat padat* dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Menurut ketentuan tersebut, tingkat kepadatan penduduk Kota Bima tergolong sangat padat. Rata-rata setiap km^2 Kota Bima didiami sebanyak 743 jiwa. Tingkat kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Rasanae Barat dan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar IV.2 Grafik Jumlah Penduduk Per Kecamatan

3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran) maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Penggolongan angka pertumbuhan penduduk merupakan suatu cara untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Ini berfungsi untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduknya. Penggolongan ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *pertumbuhan penduduk positif, negatif, dan nol*.

Pertumbuhan penduduk positif terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah ($r>0$). Hal ini terjadi karena jumlah kelahiran di wilayah tersebut melebihi jumlah kematian. Ini adalah tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kehidupan yang baik dan masyarakatnya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Namun, pertumbuhan penduduk positif juga dapat menyebabkan masalah, seperti kelangkaan sumber daya alam, kepadatan penduduk, dan masalah lingkungan.

Pertumbuhan penduduk negatif terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah berkurang ($r<0$). Hal ini terjadi karena jumlah kematian di wilayah tersebut melebihi jumlah kelahiran. Ini dapat menjadi tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan masalah sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk negatif juga dapat menyebabkan masalah, seperti kekurangan tenaga kerja, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk nol terjadi ketika jumlah penduduk di suatu wilayah tidak bertambah atau berkurang ($r=0$). Ini menunjukkan bahwa jumlah kelahiran dan kematian di wilayah tersebut sama. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang baik, sehingga tidak ada masalah sosial yang berarti. Namun, pertumbuhan penduduk nol juga dapat menyebabkan masalah, seperti kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman, masalah pendanaan, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Kesimpulannya, penggolongan angka pertumbuhan penduduk ini sangat penting untuk menentukan tingkat kebutuhan suatu wilayah dan membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduk. Dengan mengetahui jenis pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat guna mengelola jumlah penduduknya.

Tabel IV.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk 2024		Jumlah Penduduk 2023		Laju Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.999	18,77	30.611	18,95	0,46
2	52.72.02	Rasanae Timur	20.328	12,31	19.833	12,27	2,28
3	52.72.03	Asakota	37.879	22,94	36.667	22,69	2,54
4	52.72.04	Raba	41.104	24,89	40.416	25,01	1,61
5	52.72.05	Mpunda	34.803	21,08	34.050	21,07	1,10
Jumlah			165.113	100,00	161.577	100,00	1,57

Sumber : BPS Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Kota Bima dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2024 Semester II (DKB 202402) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP Elektronik didapatkan nilai sebesar 1,57 persen. Angka ini termasuk sangat tinggi (di atas Laju Pertumbuhan Nasional yakni 1,11 %).

Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Jika dilihat menurut kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Asakota yaitu 2,54 persen. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Asakota dikarenakan banyaknya dibangun perumahan di tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Asakota sehingga arus migrasi masuk lebih besar.

Ditambah lagi dengan adanya sarana transportasi yang cukup mendukung, sehingga memudahkan arus keluar masuk barang dan juga mobilitas penduduk. Untuk Kota Bima, jumlah penduduk pada tahun 2024 sejumlah 165.113 jiwa artinya mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sejumlah 3.536 jiwa. Kenaikan 3.536 penduduk menunjukkan *trend positif* secara keseluruhan pada Kota Bima. Secara laju pertumbuhan pada kecamatan terdapat trend laju pertumbuhan yang negatif pada kecamatan Rasanae Barat. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan, tingkat pendidikan dan lain-lain.

B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan.

Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	6.670	8,10	5.969	7,21	12.639	7,65
2	5-9	8.013	9,73	7.378	8,91	15.391	9,32
3	10-14	7.677	9,32	7.262	8,77	14.939	9,05
4	15-19	7.378	8,96	6.825	8,25	14.203	8,60
5	20-24	6.650	8,08	6.820	8,24	13.470	8,16
6	25-29	6.285	7,63	6.262	7,57	12.547	7,60
7	30-34	6.156	7,48	6.292	7,60	12.448	7,54
8	35-39	6.421	7,80	6.423	7,76	12.844	7,78
9	40-44	6.099	7,41	6.445	7,79	12.544	7,60
10	45-49	5.350	6,50	5.821	7,03	11.171	6,77
11	50-54	4.497	5,46	4.704	5,68	9.201	5,57
12	55-59	3.725	4,52	4.073	4,92	7.798	4,72
13	60-64	2.777	3,37	2.981	3,60	5.758	3,49
14	65-69	1.926	2,34	2.201	2,66	4.127	2,50
15	70-74	1.352	1,64	1.521	1,84	2.873	1,74
16	>=75	1.362	1,65	1.798	2,17	3.160	1,91
Jumlah		82.338	100,00	82.775	100,00	165.113	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Komposisi penduduk yang sering digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dari tabel IV.9 ini terlihat bahwa 9,55 persen penduduk Kota Bima merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota Bima dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan pemenuhan gizi balita serta investasi pendidikan usia dini. Adapun 26,02 persen penduduk Kota Bima adalah penduduk usia wajib mengenyam pendidikan dasar (0-14 tahun). Dimana pemerintah daerah perlu memperhatikan pendidikan bagi penduduk usia ini, terutama ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan lingkungan yang positif.

Komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar berada pada penduduk berumur 20-24 sebesar 8,16 persen dan 35-39 tahun 7,78 persen. Tidak hanya ketersediaan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif di rumah maupun di masyarakat, tetapi pada kelompok umur ini pemerintah juga dituntut untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja.

Untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun. Seperti telah dijelaskan di awal, penduduk usia inilah yang akan menjadi bonus demografi penduduk Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Jumlah penduduk Kota Bima, untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 82.338 jiwa atau 49,87% dan jumlah penduduk perempuan 82.775 jiwa atau 50,13%. Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk dapat digambarkan secara grafik dengan piramida penduduk.

Piramida penduduk Kota Bima tahun 2024, komposisi penduduk tertinggi berada pada rentang umur 5-9 tahun dimana komposisi penduduk laki-laki sebesar 9,73% dan penduduk perempuan 8,91% dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada rentang umur tersebut sebanyak 15.391 jiwa. Adapun komposisi penduduk terkecil berada pada rentang umur 70-74 tahun yakni 1,74% dari total penduduk Kota Bima dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 1.64% dari total penduduk Kota Bima berjenis kelamin laki-laki dan persentase penduduk perempuan 1,84% dari total penduduk Kota Bima berjenis kelamin perempuan.



Gambar IV.3 Piramida Penduduk Kota Bima

a. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Tabel IV.10 berikut ini menunjukkan lebih dari setengah (67,82%) penduduk Kota Bima merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan Pemerintah Kota Bima karena merupakan penduduk usia kerja dan 26,02 persen penduduk Kota Bima merupakan penduduk berusia kurang dari 15 tahun (penduduk usia muda) dan 6,15 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel IV.10 Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-14	22.360	27,16	20.609	24,90	42.969	26,02
2	15-64	55.338	67,21	56.646	68,43	111.984	67,82
3	>64	4.640	5,64	5.520	6,67	10.160	6,15
Jumlah		82.338	100,00	82.775	100,00	165.113	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Tabel IV.11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bima Tahun 2024

No	Rasio Ketergantungan	%
1	Muda	38,37
2	Tua	9,07
3	Total	47,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

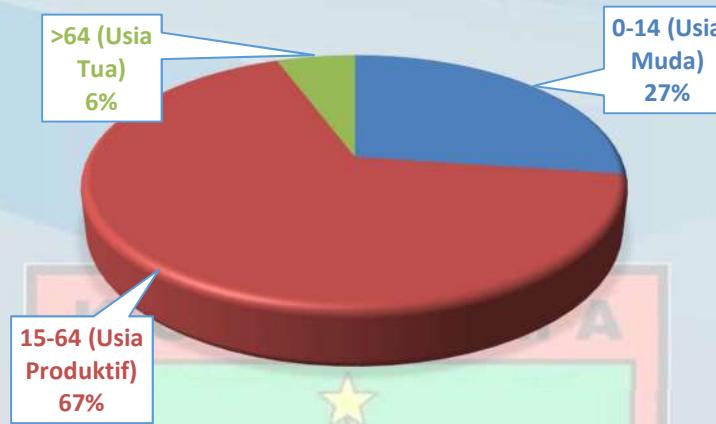
Rasio ini menunjukkan beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Dari tabel IV.10 dapat dihitung Rasio Ketergantungan Total sebesar 47,44 %, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Total sebesar 47,44 % ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (38,37 %) dan rasio penduduk tua (9,07 %). Rasio ini memberikan gambaran tentang jumlah orang yang mengandalkan orang lain untuk kebutuhan mereka, terutama dalam hal keuangan dan pengasuhan. Dampak dari tingginya rasio ketergantungan adalah beban ekonomi yang semakin berat bagi penduduk usia produktif. Banyaknya penduduk yang tidak produktif memerlukan dukungan finansial dan pelayanan khusus, seperti pelayanan kesehatan dan perawatan lansia. Hal ini dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhan negara atau daerah. Dengan kata lain, rasio ketergantungan mengindikasikan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

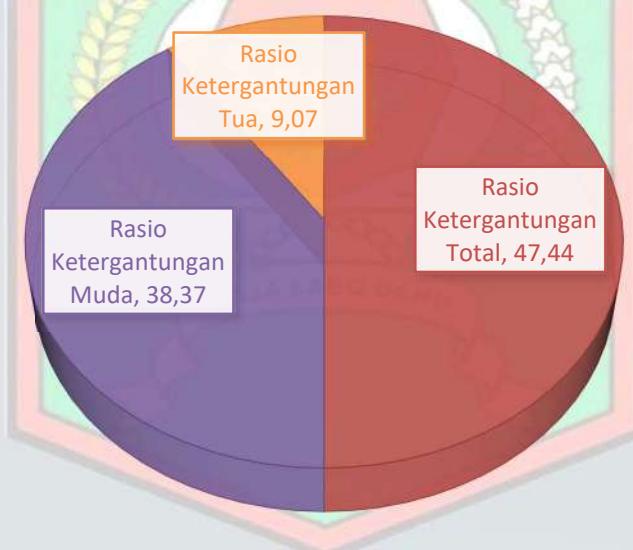
Rasio ketergantungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Jika rasio ketergantungan tinggi, maka beban ekonomi akan semakin berat dan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika rasio ketergantungan rendah, maka potensi pembangunan ekonomi akan lebih besar karena jumlah penduduk usia produktif lebih dominan. Secara umum rasio ketergantungan Kota Bima tergolong masih rendah, kondisi ini sebenarnya menguntungkan bagi Kota Bima terutama untuk membuat kebijakan dalam memperbesar tabungan rumah tangga, investasi sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasio ketergantungan, antara lain:

- Mendorong kebijakan keluarga berencana yang bijaksana untuk mengurangi jumlah kelahiran yang tidak terkendali;
- Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup lansia;
- Menggalakkan program pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif;
- Menerapkan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia produktif.



Gambar IV.4 Grafik Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Tua Tahun 2024



Gambar IV.5 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk

b. Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemasaran penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel IV.12 Persentase Kumulatif Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
0-4	12.639	12.639	7,65
5-9	15.391	28.030	16,98
10-14	14.939	42.969	26,02
15-19	14.203	57.172	34,63
20-24	13.470	70.642	42,78
25-29	12.547	83.189	50,38
30-34	12.448	95.637	57,92
35-39	12.844	108.481	65,70
40-44	12.544	121.025	73,30
45-49	11.171	132.196	80,06
50-54	9.201	141.397	85,64

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
55-59	7.798	149.195	90,36
60-64	5.758	154.953	93,85
65-69	4.127	159.080	96,35
70-74	2.873	161.953	98,09
≥ 75	3.160	165.113	100,00
Total	165.113		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah

Berdasarkan Tabel IV.12 dapat dihitung umur median (*median age*) di Kota Bima dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$Umur Median_{Md} = I_{Md} + \left[\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right]$$

Keterangan:

I_{Md} : Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$

N : Jumlah penduduk total

f_x : Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

f_{Md} : Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$

i : Kelas interval umur

Dari rumus di atas didapatkan umur median penduduk Kota Bima tahun 2024 adalah 29,75 tahun dibulatkan 30 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bima termasuk dalam kategori penduduk tua, yang berarti setengah penduduk Kota Bima pada tahun 2024 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29 tahun.

Dengan kata lain, penduduk Kota Bima dikategorikan sebagai penduduk tua yakni penduduk dalam kondisi transisi dari penduduk struktur intermediate (*intermediate population*) ke penduduk struktur tua (*old population*).

c. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

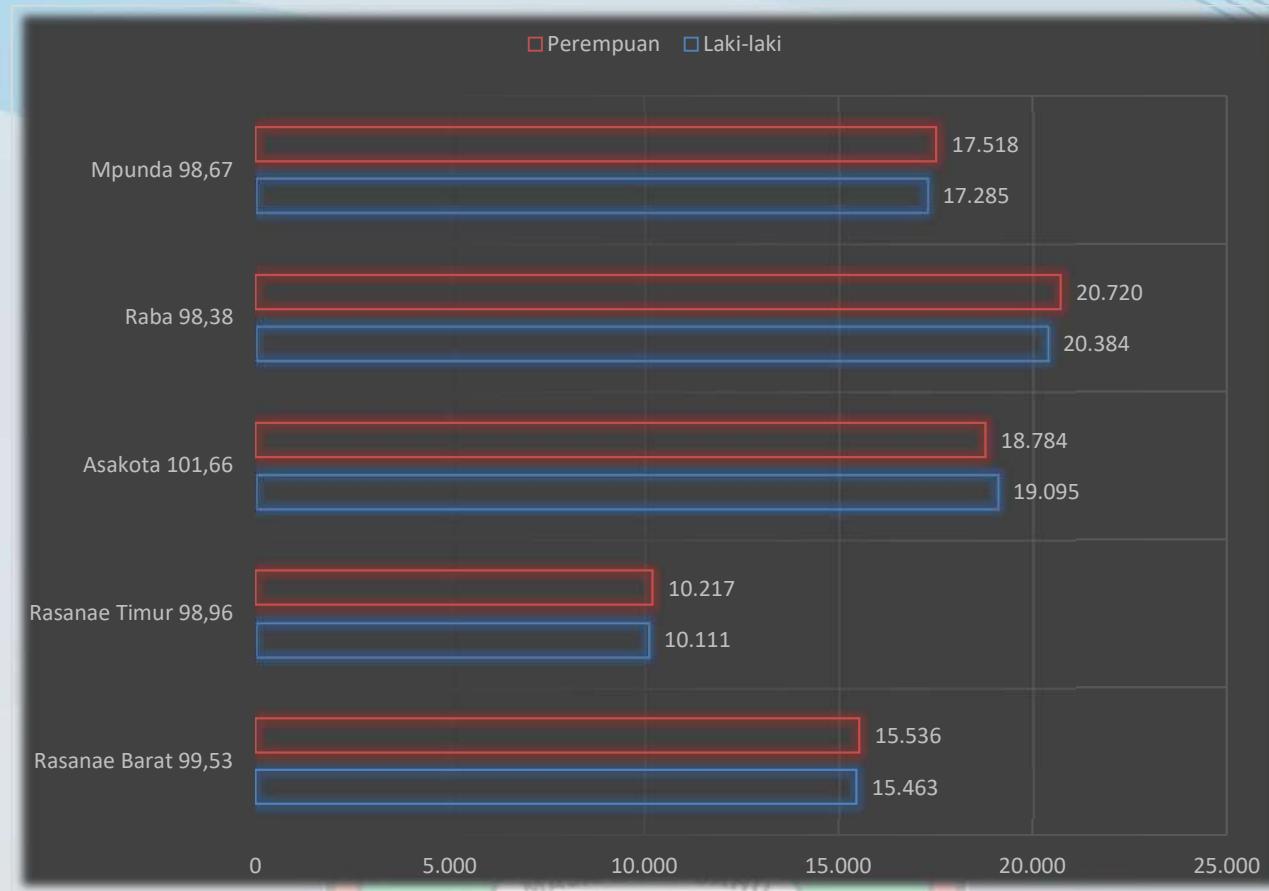
Dari tabel IV.13. berikut ini terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Kota Bima adalah 99,47 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 orang penduduk laki-laki.

Tabel IV.13 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kecamatan

Kecamatan		Jenis Kelamin		Sex Ratio
Kode	Nama	Laki-laki	Perempuan	
52.72.01	Rasanae Barat	15.463	15.536	99,53
52.72.02	Rasanae Timur	10.111	10.217	98,96
52.72.03	Asakota	19.095	18.784	101,66
52.72.04	Raba	20.384	20.720	98,38
52.72.05	Mpunda	17.285	17.518	98,67
Jumlah		82.338	82.775	99,47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah

Jika dilihat menurut wilayah kecamatan, pada gambar di bawah, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tertinggi paling tinggi berada di Kecamatan Asakota dengan nilai 101,66 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jadi dapat dipahami bahwa di Kecamatan Asakota jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Rasanae Barat (99,53), Rasanae Timur (98,96), Mpunda (98,67), dan Raba dengan nilai rasio jenis kelamin terkecil (98,38).



Gambar IV.6 Grafik Rasio Jenis Kelamin

Secara nasional menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Adapun secara spesifik *Sex Ratio* penduduk Kota Bima menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.14 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin			<i>Sex Ratio</i>
		L	P	L+P	
1	0-4	6.670	5.969	12.639	111,74
2	5-9	8.013	7.378	15.391	108,61
3	10-14	7.677	7.262	14.939	105,71
4	15-19	7.378	6.825	14.203	108,10
5	20-24	6.650	6.820	13.470	97,51
6	25-29	6.285	6.262	12.547	100,37
7	30-34	6.156	6.292	12.448	97,84
8	35-39	6.421	6.423	12.844	99,97
9	40-44	6.099	6.445	12.544	94,63
10	45-49	5.350	5.821	11.171	91,91
11	50-54	4.497	4.704	9.201	95,60
12	55-59	3.725	4.073	7.798	91,46
13	60-64	2.777	2.981	5.758	93,16
14	65-69	1.926	2.201	4.127	87,51
15	70-74	1.352	1.521	2.873	88,89
16	>=75	1.362	1.798	3.160	75,75
Jumlah		82.338	82.775	165.113	99,47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan berbanding terbalik dengan gambaran rasio jenis kelamin Kota Bima. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*).
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 00-19 tahun dan 25-29 tahun, sedangkan kelompok usia 30 tahun keatas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya.

Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun ke atas dapat dilihat penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Persentase penduduk Kota Bima menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel IV.15 di bawah ini terlihat bahwa kualitas penduduk Kota Bima menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2024 relatif tinggi. Hampir sepertiga penduduk Kota Bima (29,04%) tamat SLTA/Sederajat. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki lebih tinggi (30,17%) dibandingkan penduduk perempuan (27,91%).

Tabel IV.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan Terakhir	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tdk/Blm Sekolah	22.723	27,597	21.390	25,841	44.113	26,717
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.935	12,066	10.033	12,121	19.968	12,094
3	Tamat SD/ Sederajat	7.536	9,153	8.550	10,329	16.086	9,742
4	SLTP/Sederajat	7.874	9,563	9.038	10,919	16.912	10,243
5	SLTA/Sederajat	24.842	30,171	23.107	27,915	47.949	29,040
6	D-I/II	369	0,448	741	0,895	1.110	0,672
7	Akademi/D-III/Sarjana Muda	841	1,021	1.615	1,951	2.456	1,487
8	D-IV/S-I	7.694	9,344	8.008	9,674	15.702	9,510
9	S-II	506	0,615	291	0,352	797	0,483
10	S-III	18	0,022	2	0,002	20	0,012
Jumlah		82.338	100,00	82.775	100,00	165.113	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Untuk level pendidikan tamat SLTP/sederajat, lebih banyak perempuan sebesar 10,92 % yang menamatkan pendidikannya dari pada penduduk laki-laki yang hanya 9,56 %. Sementara level pendidikan tinggi, mulai dari jenjang Diploma I sampai dengan jenjang Diploma IV, lebih banyak penduduk perempuan yang menamatkan pendidikannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Selisih angka yang tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan *gender* dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Bima. Ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan.

Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan. Yang tidak kalah penting adalah dalam upaya peningkatan peranan perempuan sebagai guru bagi anak-anaknya, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sosial.

Dari Tabel IV.16 di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bima usia 7- 15 tahun yang tidak/belum sekolah cukup banyak yakni 18.283 orang. Lebih banyak penduduk laki-laki yang tidak bersekolah dibandingkan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk yang tidak tamat SD cukup tinggi sebesar 7.514 orang (4,55 persen) dari total jumlah penduduk Kota Bima.

Angka 7.514 jiwa ini merupakan angka kumulatif dari pencatatan yang dilakukan petugas pelayanan terhadap penduduk yang mengurus Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Pada usia pendidikan dasar 14 dan 15 cukup banyak penduduk Kota Bima yang tidak menamatkan pendidikan dasar setingkat SD. Tentu saja ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kota untuk merangkul anak usia ini untuk tetap dan mau melanjutkan pendidikan, apakah melalui paket belajar atau melalui program lain yang mendukung upaya peningkatan pendidikan dasar.

Tabel IV.16 Jumlah Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD

Usia	Tidak/Belum Sekolah				Tidak Tamat SD			
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
7	1.493	1.407	2.900	15,86	166	149	315	4,19
8	1.276	1.239	2.515	13,76	212	215	427	5,68
9	1.294	1.128	2.422	13,25	289	277	566	7,53
10	1.149	1.145	2.294	12,55	380	336	716	9,53
11	1.079	1.011	2.090	11,43	496	528	1.024	13,63
12	979	949	1.928	10,55	612	521	1.133	15,08
13	910	738	1.648	9,01	552	516	1.068	14,21
14	649	669	1.318	7,21	545	546	1.091	14,52
15	621	547	1.168	6,39	601	573	1.174	15,62
Jumlah	9.450	8.833	18.283	100,00	3.853	3.661	7.514	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

b. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Tabel IV.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin

No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	81.192	98,61	81.683	98,68	162.875	98,64
2	Kristen	630	0,77	612	0,74	1.242	0,75
3	Katholik	410	0,50	393	0,47	803	0,49
4	Hindu	95	0,12	76	0,09	171	0,10
5	Budha	11	0,01	11	0,01	22	0,01
6	Khonghucu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Kepercayaan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		82.338	100,00	82.775	100,00	165.113	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Informasi ini diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Bima memeluk agama Islam (98,64 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen 0,75 persen, Katholik 0,49 persen, Hindu 0,10 persen dan pengikut Budha hanya 0,01 persen.

Indikator ini digunakan untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait kehidupan beragama dan sarana peribadatan yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Sekaligus juga dapat melihat sejauh mana penerapan toleransi masing-masing individu di lingkungan masyarakat dalam menghargai keberagaman terutama dalam perbedaan agama yang dianut.

Tabel IV.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut dan Kecamatan

Kecamatan	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Khonghucu		Kepercayaan	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rasanae Barat	29.735	18,26	713	57,41	505	62,89	28	16,37	18	81,82	0	0,00	0	0,00
Rasanae Timur	20.308	12,47	16	1,29	4	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Asakota	37.494	23,02	230	18,52	101	12,58	52	30,41	2	9,09	0	0,00	0	0,00
Raba	40.766	25,03	167	13,45	101	12,58	69	40,35	1	4,55	0	0,00	0	0,00
Mpunda	34.572	21,23	116	9,34	92	11,46	22	12,87	1	4,55	0	0,00	0	0,00
Jumlah	162.875	100,00	1.242	100,00	803	100,00	171	100,00	22	100,00	0	0,00	0	0,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

c. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

1) Angka Perkawinan Kasar

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya seorang perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi di masa datang. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan

Kecamatan	Belum Kawin				Kawin			
	L	%	P	%	L	%	P	%
Rasanae Barat	8.255	19,67	7.146	19,36	6.485	17,41	6.604	17,40
Rasanae Timur	4.744	11,30	4.266	11,56	4.965	13,33	5.063	13,34
Asakota	9.879	23,53	8.539	23,13	8.615	23,13	8.712	22,96
Raba	10.180	24,25	8.948	24,24	9.414	25,27	9.640	25,40
Mpunda	8.919	21,25	8.018	21,72	7.772	20,86	7.928	20,89
Jumlah	41.977	100,00	36.917	100,00	37.251	100,00	37.947	100,00

Lanjutan Tabel IV.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan

Kecamatan	Cerai Hidup				Cerai Mati			
	L	%	P	%	L	%	P	%
Rasanae Barat	387	25,06	648	23,83	336	21,46	1.138	21,92
Rasanae Timur	161	10,43	280	10,30	241	15,39	608	11,71
Asakota	305	19,75	572	21,04	296	18,90	961	18,51
Raba	378	24,48	678	24,94	412	26,31	1.454	28,00
Mpunda	313	20,27	541	19,90	281	17,94	1.031	19,86
Jumlah	1.544	100,00	2.719	100,00	1.566	100,00	5.192	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di semua kecamatan persentase penduduk perempuan dengan status kawin lebih tinggi dari pada penduduk laki-laki dengan status kawin. Hal ini berbanding terbalik dengan penduduk status belum kawin, dimana laki-laki yang belum kawin lebih banyak dari pada perempuan yang belum kawin.

Jika dibandingan dengan keseluruhan penduduk dengan status cerai hidup, hanya separuh penduduk laki-laki yang berstatus cerai hidup apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini menandakan beberapa saat setelah perceraian kebanyakan laki-laki kembali melakukan perkawinan kembali.

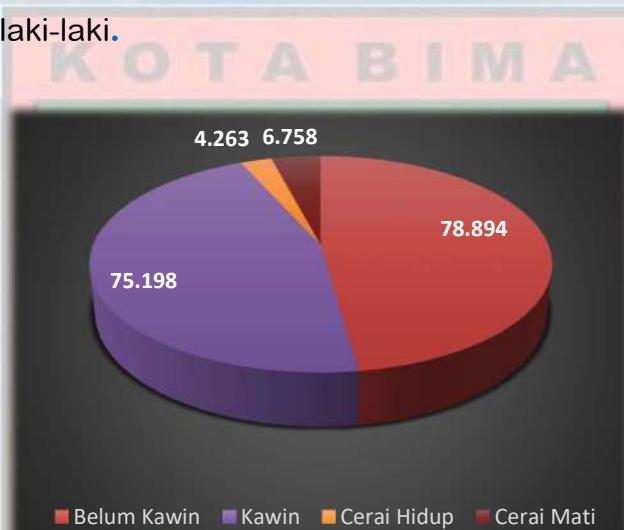
Informasi tentang struktur perkawinan penduduk dalam jangka waktu dan wilayah tertentu juga berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam usaha meningkatkan kualitas keluarga.

Tabel IV.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	41.977	50,98	36.917	44,60	78.894	47,78
2	Kawin	37.251	45,24	37.947	45,84	75.198	45,54
3	Cerai Hidup	1.544	1,88	2.719	3,28	4.263	2,58
4	Cerai Mati	1.566	1,90	5.192	6,27	6.758	4,09
Jumlah		80.311	82.338	100,00	82.775	100,00	165.113

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Di Kota Bima, status belum kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 47,78 % atau 78.894 jiwa dimana komposisi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori kawin sebesar 45,54 % atau 75.198 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Untuk status cerai mati persentasenya sebesar 4,09 %. Adapun status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 2,58 % atau sebanyak 4.263 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.



Gambar IV.7 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar merupakan merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan peceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel IV.21 Angka Perkawinan Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Status Kawin	Jumlah Penduduk			Angka Perkawinan Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Akhir Tahun	Pertengahan Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	13.089	30.611	30.999	30.805	424,90
2	52.72.02	Rasanae Timur	10.028	19.833	20.328	20.081	499,39
3	52.72.03	Asakota	17.327	36.667	37.879	37.273	464,87
4	52.72.04	Raba	19.054	40.416	41.104	40.760	467,47
5	52.72.05	Mpunda	15.700	34.050	34.803	34.427	456,04
Jumlah			75.198	161.577	165.113	163.345	460,36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Pernikahan adalah kemitraan atau hubungan yang mengikat yang disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan. Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang yang baru, batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipersamakan 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar Kota Bima adalah 460,36 artinya dari 1.000 penduduk Kota Bima terdapat 460 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum. Jika dilihat dari setiap kecamatan di Kota Bima, Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 499,39 dibandingkan dengan kecamatan lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kecamatan Rasanae Barat yaitu dengan angka 424,90.

2) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun. Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karna dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Dengan kata lain, angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin.

Tabel IV.22 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan

No	Kecamatan		Status Kawin	Jumlah Penduduk Umur >= 15	Angka Perkawinan Umum
	Kode	Nama			
1	52.72.01	Rasanae Barat	13.089	23.108	566,43
2	52.72.02	Rasanae Timur	10.028	15.057	666,00
3	52.72.03	Asakota	17.327	27.339	633,78
4	52.72.04	Raba	19.054	30.805	618,54
5	52.72.05	Mpunda	15.700	25.835	607,70
Jumlah			75.198	122.144	615,65

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Untuk Kota Bima, angka perkawinan umum sebesar 615,65 yang artinya dari 1.000 penduduk terdapat 616 penduduk usia di atas 15 tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di kecamatan Rasanae Timur dengan 666,00 dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Barat dengan 566,43.

3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Indikator angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja. angka perkawinan menurut kelompok umur atau angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka perkawinan spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur dan jenis kelamin berfungsi untuk menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur dan antar jenis kelamin. Berdasarkan Tabel IV.23 berikut ini memperlihatkan jumlah penduduk laki-laki usia 15-19 tahun adalah 7.378 jiwa dan jumlah penduduk berstatus kawin untuk kelompok umur yang sama adalah sebesar 77 jiwa, maka angka perkawinan spesifik yang didapat adalah 10,44 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun terdapat 10 orang berstatus kawin. Adapun angka perkawinan spesifik dari 216 jiwa berjenis kelamin perempuan dari 6.825 jiwa penduduk perempuan usia 15-19 tahun adalah 31,65 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun terdapat 32 orang berstatus kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cepat menikah dibandingkan laki-laki. Meskipun kecil, angka ini harus menjadi perhatian semua pihak karna seharusnya kelompok usia ini masih berada di bangku sekolah.

Salah satu tujuan diubahnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, adalah untuk menunda usia kawin bagi anak perempuan. Diketahuinya angka perkawinan menurut umur dan jenis kelamin dapat memberikan gambaran kepada pemerintah untuk pengembangan program-program yang ditujukan kepada remaja terutama tentang penundaan perkawinan.

Tabel IV.23 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Penduduk Berstatus Kawin			Age Specific Marriage Rate		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	15-19	7.378	6.825	14.203	77	216	293	10,44	31,65	20,63
2	20-24	6.650	6.820	13.470	928	1.730	2.658	139,55	253,67	197,33
3	25-29	6.285	6.262	12.547	2.803	3.872	6.675	445,98	618,33	532,00
4	30-34	6.156	6.292	12.448	4.433	5.146	9.579	720,11	817,86	769,52
5	35-39	6.421	6.423	12.844	5.355	5.478	10.833	690,39	852,87	843,43
6	40-44	6.099	6.445	12.544	5.367	5.468	10.835	878,01	848,41	863,76
7	45-49	5.350	5.821	11.171	4.784	4.800	9.584	1.003,18	824,60	857,94
8	50-54	4.497	4.704	9.201	4.059	3.730	7.789	1.063,82	792,94	846,54
9	55-59	3.725	4.073	7.798	3.356	3.080	6.436	1.089,66	756,20	825,34
10	60-64	2.777	2.981	5.758	2.460	1.996	4.456	1.208,50	669,57	773,88
11	65-69	1.926	2.201	4.127	1.615	1.212	2.827	1.277,26	550,66	685,00
12	70-74	1.352	1.521	2.873	1.092	682	1.774	807,69	448,39	617,47
13	>=75	1.362	1.798	3.160	922	536	1.458	676,95	298,11	461,39
Jumlah		59.978	62.166	122.144	37.251	37.946	75.197	621,08	610,40	615,64

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

4) Rata-rata Usia Kawin Pertama/*Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)* adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan serta program lainnya untuk pendewasaan usia perkawinan.

Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*. Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan keturunan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut. Status Lajang yakni keadaan dimana seorang laki-laki ataupun perempuan berstatus belum pernah kawin atau belum berumah tangga. Terdapat 15.858 jiwa perempuan dalam rentang usia 15-54 tahun yang belum pernah menikah atau berstatus lajang di Kota Bima. Persentase lajang tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dengan angka 96,79 %, hal itu dipicu karena pada kelompok umur tersebut belum matang untuk melakukan pernikahan dan menjadi kepala keluarga. Pada kelompok umur 45-49 menjadi persentase lajang terendah dengan angka 301 jiwa atau 5,17 %.

Tabel IV.24 Jumlah Perempuan (Usia 15-49 Tahun) menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Status Perkawinan Perempuan Usia 15-49 Tahun				Jumlah Penduduk Perempuan (15-49 Tahun)	Proporsi Perempuan Belum Kawin (%)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (15-49 tahun)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (25-49 Tahun)
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati				
1	15-19	7	216	3	0	226	3.10	37 tahun	41 tahun
2	20-24	5	2	80	5	92	5.43		
3	25-29	2	4	205	15	226	0.88		
4	30-34	803	5	314	29	1,151	69.77		
5	35-39	427	5	414	104	950	44.95		
6	40-44	328	5	489	160	982	33.40		
7	45-49	301	5	404	316	1,026	29.34		
Jumlah		1.873	242	1.909	629	4.653	40,25	37 Tahun	41 Tahun

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2024.

Dari table di atas dapat dihitung angka perkawinan umur pertama/SMAM (*Singulate Mean Age at Marriage*) perempuan di Kota Bima pada tahun 2024 yakni 37, ini berarti bahwa perkawinan pertama rata-rata perempuan di Kota Bima dilakukan pada usia 41 tahun. Angka ini cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kota Bima telah menunda umur kawin pertama mereka.

5) Angka Perceraian Kasar (*Divorce*)

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel IV.25 Angka Perceraian Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Status Cerai Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Perceraian Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Akhir Tahun	Tengah Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	1.035	30.611	30.999	30.805	33,60
2	52.72.02	Rasanae Timur	441	19.833	20.328	20.081	21,96
3	52.72.03	Asakota	877	36.667	37.879	37.273	23,53
4	52.72.04	Raba	1.056	40.416	41.104	40.760	25,91
5	52.72.05	Mpunda	854	34.050	34.803	34.427	24,81
Jumlah		4.263		161.577	165.113	163.345	26,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Secara keseluruhan bernilai 26,10 yang artinya terdapat perceraian sebanyak 26 per seribu penduduk pada tahun 2024 di Kota Bima. Angka peceraian kasar tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan angka 33,60 yang berarti terdapat 33-34 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2024.

6) Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum ini merupakan salah satu indikator angka perceraian yang lebih cermat karna dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang terkena resiko perceraian yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Tabel IV.26 Angka Perceraian Umum per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Angka Perceraian Umum
	Kode	Nama	Status Cerai Hidup	Umur >= 15	
1	52.72.01	Rasanae Barat	1.035	23.108	44,79
2	52.72.02	Rasanae Timur	441	15.057	29,29
3	52.72.03	Asakota	877	27.339	32,08
4	52.72.04	Raba	1.056	30.805	34,28
5	52.72.05	Mpunda	854	25.835	33,06
Jumlah			4.263	122.144	34,90

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah

Informasi data tersebut dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup. Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan, karena pada umumnya usia tersebut belum termasuk usia perkawinan dan mereka tidak beresiko bercerai.

Angka perceraian umum di Kota Bima sebesar 34,90 artinya dari seribu penduduk terdapat 35 penduduk berstatus cerai hidup pada tahun 2024. Kecamatan Rasanae Barat memiliki angka perceraian tertinggi 44,79 yang berarti terdapat 45 perceraian per seribu penduduk pada tahun 2024. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang angka perceraianya terendah yaitu 29,29 yang berarti terdapat 29 status cerai hidup dalam seribu penduduk pada tahun 2024.

Berdasarkan data yang ada salah satu faktor penyebab perceraian yang dicatatkan di Pengadilan Agama Kota Bima adalah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta dikarenakan meninggalkan salah satu pihak. Meskipun kecil, angka perceraian ini menunjukkan kualitas perkawinan individu di Kota Bima, sehingga perlu keikutsertaan semua pihak dalam mewujudkan perkawinan yang berkualitas. Sehingga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri tidak cepat dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

3. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Karakteristik Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penanganan kemiskinan, dan kesehatan. Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefiniskan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya.

Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga Inti (*Nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin;

- Keluarga Luas (*Extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

- Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
- Status hubungan dalam keluarga;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
- Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
- Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan;
- Karakteristik kepala keluarga menurut status bekerja.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan, dan lain sebagainya.

Tabel IV.27 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jumlah Keluarga		Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	30.999	18,77	10.067	19,15	3
2	52.72.02	Rasanae Timur	20.328	12,31	6.737	12,82	3
3	52.72.03	Asakota	37.879	22,94	11.523	21,92	3
4	52.72.04	Raba	41.104	24,89	13.472	25,63	3
5	52.72.05	Mpunda	34.803	21,08	10.767	20,48	3
Jumlah			165.113	100,00	52.566	100,00	3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang dinamakan perkawinan. Keluarga dipimpin oleh kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan keluarga yakni kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga. Dari tabel IV.27 terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Bima sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Bima merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kecamatan juga terdiri dari 3 orang per keluarga. Jumlah kepala keluarga di Kota Bima sebanyak 52.566 kepala keluarga yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Raba memiliki jumlah kepala keluarga paling banyak yaitu 13.472 (25,63 %) kemudian disusul oleh kecamatan Asakota sebanyak 11.523 kepala keluarga (21,92 %) dan Kecamatan Mpunda sebanyak 10.767 kepala keluarga (20,48 %), lalu Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 10.067 kepala keluarga (19,15 %). Sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 6.737 kepala keluarga (12,82 %).

b. Status Hubungan dalam Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*), dan pola pengasuhan anak. Anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga atau family lainnya.

Tabel IV.28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dalam Keluarga

No	SHDK	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	41.562	50,477	11.004	13,294	52.566	31,836
2	Suami	2	0,002	0	0,000	2	0,001
3	Istri	0	0,000	35.644	43,061	35.644	21,588
4	Anak	39.578	48,068	34.753	41,985	74.331	45,018
5	Menantu	0	0,000	1	0,001	1	0,001
6	Cucu	498	0,605	438	0,529	936	0,567
7	Orang Tua	16	0,019	110	0,133	126	0,076
8	Mertua	9	0,011	68	0,082	77	0,047
9	Family Lain	651	0,791	726	0,877	1.377	0,834
10	Pembantu	0	0,000	3	0,004	3	0,002
11	Lainnya	22	0,027	28	0,034	50	0,030
Jumlah		82.338	100,000	82.775	100,000	165.113	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Tabel IV.28 di atas menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Dapat dilihat bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yakni 41.562 kepala keluarga, 24.640 diantaranya memiliki istri. Perempuan yang menjadi kepala keluarga angkanya cukup tinggi yakni 11.004 jiwa, salah satu penyebabnya adalah perceraian dan kematian kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup, cerai mati, maupun nikah dibawah tangan. Faktor mutasi pun ikut mempengaruhi angka tersebut, karena fakta di lapangan bahwa banyak kepala keluarga laki-laki yang harus merantau atau tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama yang mengharuskan mereka terdata dalam kartu keluarga berbeda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (extended family) di Kota Bima jumlahnya tidak besar.

Status hubungan dalam keluarga dipergunakan untuk mengetahui posisi anggota keluarga dengan kepala keluarga. Dilihat dari tabel jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga, status terbesar adalah anak yaitu sebanyak 74.331 jiwa atau sebesar 45,018 %, dengan jumlah anak laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 38.224 jiwa dibandingkan dengan jumlah anak perempuan yaitu sebesar 39.578 jiwa.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kecamatan

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan berstatus menikah maupun tidak yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara

ekonomi, sosial, maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui karena berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

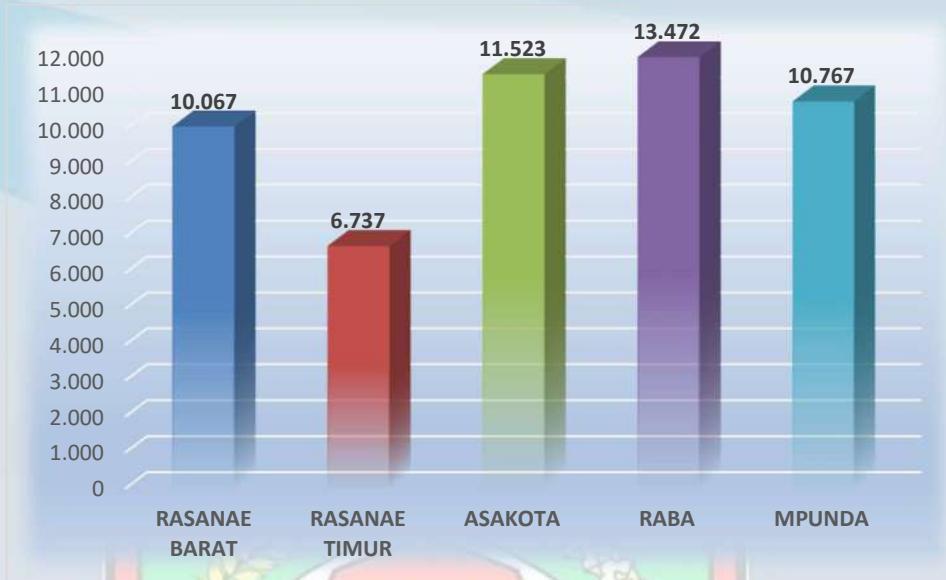
Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Dari Tabel IV.29 berikut ini dapat dilihat jumlah dan proporsi kepala keluarga Kota Bima tahun 2024 menurut kecamatan dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Bima adalah laki-laki yaitu 41.562 orang (79,07%).

Tabel IV.29 Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	52.72.01	Rasanae Barat	7.556	18,18	2.511	22,82	10.067	19,15
2	52.72.02	Rasanae Timur	5.489	13,21	1.248	11,34	6.737	12,82
3	52.72.03	Asakota	9.421	22,67	2.102	19,10	11.523	21,92
4	52.72.04	Raba	10.520	25,31	2.952	26,83	13.472	25,63
5	52.72.05	Mpunda	8.576	20,63	2.191	19,91	10.767	20,48
Jumlah			41.562	79,07	11.004	20,93	52.566	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.



Gambar IV.8 Grafik Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan

Tabel IV.29 juga menunjukkan banyaknya kepala keluarga yang ada di lima wilayah kecamatan di Kota Bima. Ada sebanyak 52.566 kepala keluarga yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Bima. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga tertinggi berada di Kecamatan Raba yaitu 13.472 kepala keluarga, sedangkan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kecamatan Rasanae Timur dengan 6.737 kepala keluarga.

Sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 11.004 orang (20,93%) atau dengan perbandingannya sekitar 4 : 1, yang artinya dari 4 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Tabel IV.29 juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai, atau sebab-sebab yang lain.

Tabel IV.30 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Barat

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.01	Rasanae Barat		7.556	75,06	2.511	24,94	10.067	100,00
1	1001	Paruga	1.331	17,62	449	17,88	1.780	17,68
2	1002	Nae	1.009	13,35	360	14,34	1.369	13,60
3	1003	Sarae	1.242	16,44	396	15,77	1.638	16,27
4	1004	Tanjung	1.599	21,16	521	20,75	2.120	21,06
5	1013	Pane	647	8,56	287	11,43	934	9,28
6	1014	Dara	1.728	22,87	498	19,83	2.226	22,11

Tabel IV.31 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Rasanae Timur

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.02	Rasanae Timur		5.489	81,48	1.248	18,52	6.737	100,00
1	1004	Kumbe	1.063	19,37	293	23,48	1.356	20,13
2	1008	Lampe	445	8,11	93	7,45	538	7,99
3	1009	Dodu	913	16,63	212	16,99	1.125	16,70
4	1011	Nungga	701	12,77	135	10,82	836	12,41
5	1018	Kodo	597	10,88	167	13,38	764	11,34
6	1019	Oi Fo'o	639	11,64	103	8,25	742	11,01
7	1020	Lelamase	613	11,17	113	9,05	726	10,78
8	1021	Oimbo	518	9,44	132	10,58	650	9,65

Tabel IV.32 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Asakota

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.03	Asakota		9.421	81,76	2.102	18,24	11.523	100,00
1	1001	Melayu	1.353	14,36	449	21,36	1.802	15,64
2	1002	Jatiwangi	1.950	20,70	423	20,12	2.373	20,59
3	1003	Jatibaru	1.623	17,23	365	17,36	1.988	17,25
4	1004	Kolo	1.595	16,93	321	15,27	1.916	16,63
5	1005	Jatibaru Timur	1.197	12,71	256	12,18	1.453	12,61
6	1006	Ule	1.703	18,08	288	13,70	1.991	17,28

Tabel IV.33 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Raba

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.04	Raba		10.520	78,09	2.952	21,91	13.472	100,00
1	1001	Penaraga	1.251	11,89	427	14,46	1.678	12,46
2	1002	Rontu	879	8,36	242	8,20	1.121	8,32
3	1003	Penanae	1.076	10,23	294	9,96	1.370	10,17
4	1004	Kendo	463	4,40	90	3,05	553	4,10
5	1005	Ntobo	1.096	10,42	224	7,59	1.320	9,80
6	1006	Nitu	448	4,26	74	2,51	522	3,87
7	1007	Rabangodu Selatan	1.036	9,85	278	9,42	1.314	9,75
8	1008	Rabadompu Timur	998	9,49	308	10,43	1.306	9,69
9	1009	Rite	641	6,09	147	4,98	788	5,85
10	1010	Rabadompu Barat	1.400	13,31	469	15,89	1.869	13,87
11	1011	Rabangodu Utara	1.232	11,71	399	13,52	1.631	12,11

Tabel IV.34 Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Mpunda

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
52.72.05	Mpunda		8.576	79,65	2.191	20,35	10.767	100,00
1	1001	Monggonao	1.021	11,91	301	13,74	1.322	12,28
2	1002	Sadia	941	10,97	227	10,36	1.168	10,85
3	1003	Santi	703	8,20	162	7,39	865	8,03
4	1004	Sambinae	961	11,21	198	9,04	1.159	10,76
5	1005	Penatoi	1.160	13,53	339	15,47	1.499	13,92
6	1006	Lewirato	500	5,83	139	6,34	639	5,93
7	1007	Mande	717	8,36	229	10,45	946	8,79
8	1008	Panggi	722	8,42	169	7,71	891	8,28
9	1009	Manggemaci	1.064	12,41	287	13,10	1.351	12,55
10	1010	Matakando	787	9,18	140	6,39	927	8,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Banyaknya jumlah kepala keluarga di setiap kelurahan ditunjukkan pada informasi data jumlah kepala keluarga per kelurahan pada tabel IV.30-34. Ada 41 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan dalam wilayah Kota Bima. Jumlah kepala keluarga di Kota Bima ada sebanyak 52.566 KK dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 41.562 KK dan kepala keluarga perempuan ada 11.004 KK. Adapun jumlah kepala keluarga terbesar berada di Kelurahan Jatiwangi yang terletak di Kecamatan Asakota sebanyak 2.373 KK atau ada 4,51 % dari jumlah KK seluruh Kota Bima, sedangkan jumlah kepala keluarga terkecil berada di Kelurahan Nitu yang terletak di Kecamatan Raba dengan angka 522 KK atau 0,99 % dari jumlah KK seluruh Kota Bima.

d. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Informasi data jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok umur pada tabel IV.35 di bawah ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran keadaan sosial dan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh laki-laki ataupun perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga tertinggi berada pada umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 6.854 KK atau ada 13,04 persen, yang mana jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi berada pada umur ≥ 75 tahun dengan angka sebesar 1.278 jiwa (11,61 %). Hal ini menunjukkan bahwa mereka menjadi kepala keluarga karena telah ditinggal suaminya sebab kematian atau hal lainnya. Kepala keluarga terendah berada pada umur 15-19 dengan angka 197 atau ada 0,37 %, hal itu dapat menunjukkan bahwa angka harapan hidup kepala keluarga di Kota Bima tergolong tinggi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana pada kelompok umur 55-59 tahun jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan tangguh dengan memiliki keterampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, apabila kelak sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Dari tabel IV.35 berikut ini juga dapat dilihat kepala keluarga pada kelompok umur 15-19 tahun (usia mengenyam pendidikan) tentu perlu menjadi perhatian seluruh pihak, karena seharusnya pada usia ini berada pada bangku sekolah.

Tabel IV.35 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	5-9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	10-14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	15-19	134	0,32	63	0,57	197	0,37
5	20-24	1.118	2,69	280	2,54	1.398	2,66
6	25-29	3.171	7,63	460	4,18	3.631	6,91
7	30-34	4.866	11,71	620	5,63	5.486	10,44
8	35-39	5.799	13,95	853	7,75	6.652	12,65
9	40-44	5.811	13,98	1.043	9,48	6.854	13,04
10	45-49	5.199	12,51	1.083	9,84	6.282	11,95
11	50-54	4.412	10,62	1.085	9,86	5.497	10,46
12	55-59	3.693	8,89	1.135	10,31	4.828	9,18
13	60-64	2.764	6,65	1.103	10,02	3.867	7,36
14	65-69	1.916	4,61	1.100	10,00	3.016	5,74
15	70-74	1.346	3,24	901	8,19	2.247	4,27
16	>=75	1.333	3,21	1.278	11,61	2.611	4,97
Jumlah		41.562	100,00	11.004	100,00	52.566	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

Kepala keluarga merupakan seseorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Informasi kepala keluarga berdasarkan status perkawinan, dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam bidang sosial yang hubungannya dengan status perkawinan dan jenis kelamin penduduk.

Pada umumnya kepala keluarga di Kota Bima sebanyak 39.279 (74,72 %) berstatus kawin. Di samping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2.548 jiwa setara 4,85 persen.

Tabel IV.36 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum Kawin	1.325	3,19	1.223	11,11	2.548	4,85
2	Kawin	37.180	89,46	2.099	19,07	39.279	74,72
3	Cerai Hidup	1.511	3,64	2.660	24,17	4.171	7,93
4	Cerai Mati	1.546	3,72	5.022	45,64	6.568	12,49
Jumlah		41.562	100,00	11.004	100,00	52.566	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.



Gambar IV.9 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

Berdasarkan Tabel IV.36 ada sebanyak 52.566 kepala keluarga di Kota Bima dengan jumlah kepala keluarga laki-laki ada 41.562 KK dan ada 11.004 kepala keluarga perempuan. Hal tersebut menunjukkan kepala keluarga yang dikepalai oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Hal yang menarik adalah kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin tampak tinggi, hal ini kemungkinan juga dikarenakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Selain itu juga disebabkan laki-laki yang berpoligami secara sah. Dari tabel di atas dapat dilihat, persentase perempuan yang menjadi kepala keluarga dan berstatus kawin adalah sebanyak 2.099 atau 19,07 persen dari total kepala keluarga berjenis kelamin perempuan.

Perbedaan mencolok terlihat pada proporsi jenis kelamin, perbandingan jumlah kepala keluarga dengan status cerai mati yang didominasi perempuan, sebanyak 1.546 KK laki-laki atau ada 3,72 % dari total kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki dan 5.022 KK perempuan atau 45,64 % dari total kepala keluarga berjenis kelamin perempuan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perempuan bisa bertahan menjadi kepala keluarga setelah ditinggal mati suami.

Adapun 2.548 kepala keluarga berstatus belum kawin biasanya merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Namun hal ini perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau hidup sendirian.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Dari tabel IV.37 berikut ini terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kota Bima berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana.

Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar berada pada kelompok umur 25-29 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun.

Tabel IV.37 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

No	Kelompok Umur	Status Perkawinan								Jumlah	
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati			
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	0-4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	5-9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	10-14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	15-19	110	4,32	82	0,21	5	0,12	0	0,00	197	0,37
5	20-24	310	12,17	975	2,48	108	2,59	5	0,08	1.398	2,66
6	25-29	383	15,03	2.909	7,41	317	7,60	22	0,33	3.631	6,91
7	30-34	327	12,83	4.591	11,69	519	12,44	49	0,75	5.486	10,44
8	35-39	248	9,73	5.595	14,24	664	15,92	145	2,21	6.652	12,65
9	40-44	239	9,38	5.659	14,41	737	17,67	219	3,33	6.854	13,04
10	45-49	250	9,81	5.027	12,80	617	14,79	388	5,91	6.282	11,95
11	50-54	185	7,26	4.282	10,90	479	11,48	551	8,39	5.497	10,46
12	55-59	188	7,38	3.560	9,06	306	7,34	774	11,78	4.828	9,18
13	60-64	121	4,75	2.605	6,63	188	4,51	953	14,51	3.867	7,36
14	65-69	75	2,94	1.758	4,48	112	2,69	1.071	16,31	3.016	5,74
15	70-74	52	2,04	1.184	3,01	64	1,53	947	14,42	2.247	4,27
16	>=75	60	2,35	1.052	2,68	55	1,32	1.444	21,99	2.611	4,97
Jumlah		2.548	100,00	39.279	100,00	4.171	100,00	6.568	100,00	52.566	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Dari tabel IV.38 berikut dapat dilihat persentase terbesar pekerjaan kepala keluarga yaitu wiraswasta yaitu 12.050 KK dan petani/pekebun sebesar 7.444 KK. Untuk kelompok perempuan proporsi terbesar adalah mengurus rumah tangga yakni 7.478 KK. Data tersebut mengindikasikan bahwa peran usaha swasta dan pertanian/perkebunan di Kota Bima sangat berkontribusi pada pembentukan pendapatan perkapita penduduk Kota Bima dengan demikian sektor industri kecil dan perdagangan masih sebagai lahan penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk Kota Bima.

Tabel IV.38 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	3.071	7,389	786	7,141	3.857	7,337
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0,000	7.478	67,939	7.478	14,226
3	PELAJAR/MAHASISWA	398	0,958	249	2,262	647	1,231
4	PENSIUNAN	1.339	3,222	266	2,417	1.605	3,053
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.603	8,670	485	4,406	4.088	7,777
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	291	0,700	0	0,000	291	0,554
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	662	1,593	3	0,027	665	1,265
8	PERDAGANGAN	194	0,467	76	0,690	270	0,514
9	PETANI/PEKEBUN	7.382	17,763	62	0,563	7.444	14,161

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
10	PETERNAK	28	0,067	0	0,000	28	0,053
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.119	2,693	2	0,018	1.121	2,133
12	INDUSTRI	6	0,014	1	0,009	7	0,013
13	KONSTRUKSI	12	0,029	1	0,009	13	0,025
14	TRANSPORTASI	302	0,727	0	0,000	302	0,575
15	KARYAWAN SWASTA	3.174	7,637	187	1,699	3.361	6,394
16	KARYAWAN BUMN	387	0,931	10	0,091	397	0,755
17	KARYAWAN BUMD	65	0,156	2	0,018	67	0,127
18	KARYAWAN HONORER	2.162	5,202	281	2,553	2.443	4,647
19	BURUH HARIAN LEPAS	1.385	3,333	5	0,045	1.390	2,644
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.408	3,388	11	0,100	1.419	2,699
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	61	0,147	0	0,000	61	0,116
22	BURUH PETERNAKAN	14	0,034	0	0,000	14	0,027
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0,000	29	0,263	29	0,055
24	TUKANG CUKUR	9	0,022	0	0,000	9	0,017
25	TUKANG LISTRIK	14	0,034	0	0,000	14	0,027
26	TUKANG BATU	528	1,270	0	0,000	528	1,004
27	TUKANG KAYU	453	1,090	0	0,000	453	0,862
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0,007	1	0,009	4	0,008
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	35	0,084	0	0,000	35	0,067
30	TUKANG JAHIT	37	0,089	18	0,164	55	0,105
31	TUKANG GIGI	1	0,002	0	0,000	1	0,002
32	PENATA RIAS	2	0,005	1	0,009	3	0,006
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,009	1	0,002
34	PENATA RAMBUT	2	0,005	1	0,009	3	0,006

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
35	MEKANIK	111	0,267	0	0,000	111	0,211
36	SENIMAN	10	0,024	1	0,009	11	0,021
37	TABIB	2	0,005	0	0,000	2	0,004
38	PARAJI	1	0,002	0	0,000	1	0,002
39	PERANCANG BUSANA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
40	PENTERJEMAH	1	0,002	0	0,000	1	0,002
41	IMAM MASJID	4	0,010	0	0,000	4	0,008
42	PENDETA	7	0,017	0	0,000	7	0,013
43	PASTOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
44	WARTAWAN	40	0,096	1	0,009	41	0,078
45	USTADZ/MUBALIGH	1	0,002	1	0,009	2	0,004
46	JURU MASAK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
47	PROMOTOR ACARA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
48	ANGGOTA DPR RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
49	ANGGOTA DPD RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
50	ANGGOTA BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
51	PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	WAKIL PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
55	DUTA BESAR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
57	WAKIL GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
58	BUPATI	0	0,000	1	0,009	1	0,002
59	WAKIL BUPATI	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
60	WALIKOTA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
61	WAKIL WALIKOTA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
62	ANGGOTA DPRD PROP.	2	0,005	0	0,000	2	0,004
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	15	0,036	0	0,000	15	0,029
64	DOSEN	182	0,438	15	0,136	197	0,375
65	GURU	531	1,278	150	1,363	681	1,296
66	PILOT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
67	PENGACARA	29	0,070	1	0,009	30	0,057
68	NOTARIS	6	0,014	0	0,000	6	0,011
69	ARSITEK	1	0,002	0	0,000	1	0,002
70	AKUNTAN	1	0,002	0	0,000	1	0,002
71	KONSULTAN	11	0,026	0	0,000	11	0,021
72	DOKTER	46	0,111	10	0,091	56	0,107
73	BIDAN	0	0,000	21	0,191	21	0,040
74	PERAWAT	61	0,147	12	0,109	73	0,139
75	APOTEKER	7	0,017	0	0,000	7	0,013
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,000	0	0,000	0	0,000
77	PENYIAR TELEVISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
78	PENYIAR RADIO	1	0,002	0	0,000	1	0,002
79	PELAUT	73	0,176	0	0,000	73	0,139
80	PENELITI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
81	SOPIR	656	1,578	0	0,000	656	1,248
82	PIALANG	1	0,002	0	0,000	1	0,002
83	PARANORMAL	0	0,000	0	0,000	0	0,000
84	PEDAGANG	248	0,597	122	1,108	370	0,704

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
85	PERANGKAT DESA	1	0,002	0	0,000	1	0,002
86	KEPALA DESA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,000	3	0,027	3	0,006
88	WIRASWASTA	11.344	27,296	706	6,414	12.050	22,924
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
90	ARTIS	0	0,000	0	0,000	0	0,000
91	ATLIT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
92	CHEFF	0	0,000	0	0,000	0	0,000
93	MANAJER	0	0,000	0	0,000	0	0,000
94	TENAGA TATA USAHA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
95	OPERATOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
97	TEKNISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
98	ASISTEN AHLI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
99	PEKERJAAN LAINNYA	18	0,043	7	0,064	25	0,048
Jumlah		41.559	100,000	11.007	100,000	52.566	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis pekerjaan digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang bekerja di sektor pekerjaan tertentu yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai. Dapat diindikasikan kepala keluarga yang tidak bekerja, biasanya ini dikarenakan kepala keluarga yang berusia lanjut dan tidak kuat bekerja.

Selain Kepala Keluarga yang tidak bekerja, juga ditemukan kepala keluarga yang pekerjaannya pelajar/mahasiswa. Hal ini dikarenakan perkawinan di usia sekolah, dan tidak melakukan pemutakhiran Kartu Keluarga setelah menikah. Selain itu juga disebabkan oleh kepala keluarga pindah atau meninggal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan data yang dilaporkan oleh penduduk.

h. Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga serta semakin tinggi juga tingkat pendidikan anggota keluarganya terutama anak-anaknya kelak. Karena Kepala Keluarga adalah contoh dan panutan bagi anak-anaknya. Jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

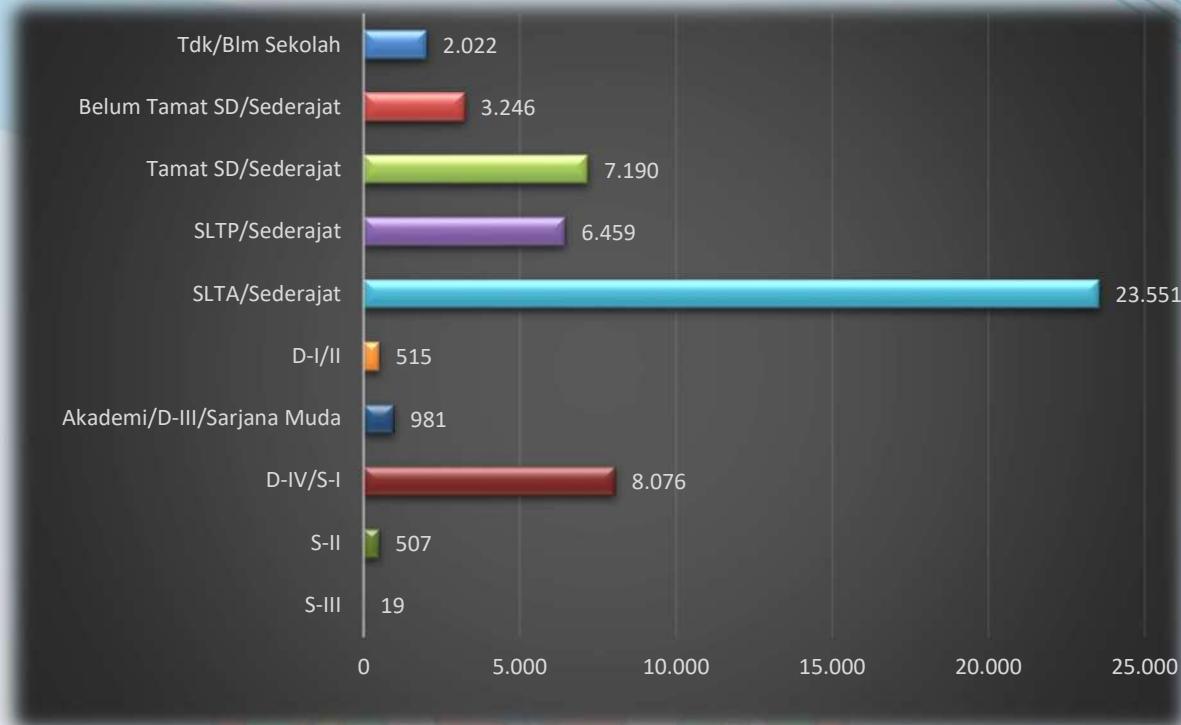
Tingkat pendidikan seorang kepala keluarga mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki seorang kepala keluarga bisa menjadi salah satu faktor kepala keluarga untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarganya. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data dari tabel IV.39, kepala keluarga didominasi oleh tamatan SLTA/Sederajat yakni 23.551 KK atau 44,80 %. Angka tersebut terdiri atas laki-laki dengan angka 19.521 (46,97 %) yang lebih banyak dibanding perempuan dengan angka 4.030 (36,62 %). Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga yang rendah mengindikasi pendapatan yang juga rendah, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari tabel IV.39, juga terlihat bahwa untuk kepala keluarga tamat SD/Sederajat sebesar 13,68 persen, tamat SLTP/sederajat 12,29 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,85 persen dan S1/S2/S3 Sebesar 16,36 persen. Sangat disayangkan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD yang persentasenya 10,02 persen. Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, kebanyakan kepala keluarga perempuan berpendidikan rendah yaitu belum tamat SD dan tamat SD dengan angka 29,74 persen dari keseluruhan penduduk perempuan dengan status kepala keluarga. Proporsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki yang berpendidikan rendah yakni hanya 17,23 persen.

Tabel IV.39 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1.204	2,90	818	7,43	2.022	3,85
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2.054	4,94	1.192	10,83	3.246	6,18
3	Tamat SD/Sederajat	5.109	12,29	2.081	18,91	7.190	13,68
4	SLTP/Sederajat	4.911	11,82	1.548	14,07	6.459	12,29
5	SLTA/Sederajat	19.521	46,97	4.030	36,62	23.551	44,80
6	Diploma I/II	357	0,86	158	1,44	515	0,98
7	Akademi/Diploma III	779	1,87	202	1,84	981	1,87
8	Siploma IV/Strata I	7.133	17,16	943	8,57	8.076	15,36
9	Strata II	476	1,15	31	0,28	507	0,96
10	Strata III	18	0,04	1	0,01	19	0,04
Jumlah		41.562	100,00	11.004	100,00	52.566	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah



Gambar IV.10 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Jumlah Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

Tabel IV.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	22.723	27,597	21.390	25,841	44.113	26,717
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.935	12,066	10.033	12,121	19.968	12,094
3	Tamat SD/Sederajat	7.536	9,153	8.550	10,329	16.086	9,742
4	SLTP/Sederajat	7.874	9,563	9.038	10,919	16.912	10,243
5	SLTA/Sederajat	24.842	30,171	23.107	27,915	47.949	29,040
6	Diploma I/II	369	0,448	741	0,895	1.110	0,672
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	841	1,021	1.615	1,951	2.456	1,487
8	Diploma IV/Strata I	7.694	9,344	8.008	9,674	15.702	9,510
9	Strata II	506	0,615	291	0,352	797	0,483
10	Strata III	18	0,022	2	0,002	20	0,012
Jumlah		82.338	100,000	82.775	100,000	165.113	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Pada Tabel IV.40 dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kota Bima adalah pada jenjang SLTA/Sederajat yaitu 47.949 jiwa dimana penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan tenaga kerja dengan kriteria minimal pendidikan SLTA/Sederajat menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut sehingga jumlah penduduk pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, kemudian disusul SLTP/Sederajat dengan 16.912 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.874 jiwa dan perempuan 9.038 jiwa. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan relatif lebih tinggi dari penduduk laki-laki.

Sementara level pendidikan tinggi, mulai dari jenjang Diploma I sampai dengan jenjang Strata I, lebih banyak penduduk perempuan yang menamatkan pendidikannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan Diploma I sampai dengan strata I adalah 10.364 orang, sementara untuk pendidikan laki-laki hanya 8.904 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Bima. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan. Yang tidak kalah penting adalah dalam upaya peningkatan peranan perempuan sebagai guru bagi anak-anaknya, baik di rumah tangga maupun di lingkungan sosial. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah menunjukkan angka yang cukup besar yakni 44.113 jiwa, sehingga perlu dianalisa seberapa besar porsi usia wajib belajar didalamnya.

Dari Tabel IV.41 dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bima usia 7-15 tahun yang tidak/belum sekolah cukup banyak yakni 18.283 orang. Untuk persentase penduduk usia 7 tahun yang tidak sekolah/Belum sekolah sebesar 15,86 persen dari total jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah. Lebih banyak penduduk laki-laki yang tidak bersekolah dibandingkan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk wajib belajar yang tidak tamat SD cukup tinggi sebesar 7.514 orang (4,55 persen) dari total jumlah penduduk Kota Bima.

Angka 7.514 orang ini merupakan angka kumulatif dari pencatatan yang dilakukan petugas pelayanan terhadap penduduk yang mengurus Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Pada usia pendidikan dasar 14 dan 15 cukup banyak penduduk Kota Bima yang tidak menamatkan pendidikan dasar setingkat SD. Tentu saja ini menuntut perhatian dari Pemerintah Kota Bima untuk merangkul anak usia ini untuk tetap dan mau melanjutkan pendidikan, apakah melalui paket belajar atau melalui program lain yang mendukung upaya peningkatan pendidikan dasar.

Tabel IV.41 Jumlah Penduduk Wajib Belajar yang Tidak/Belum Sekolah dan Tidak Tamat SD

Usia	Tidak/Belum Sekolah				Tidak Tamat SD			
	L	P	L+P	%	L	P	L+P	%
7	1.493	1.407	2.900	15,86	166	149	315	4,19
8	1.276	1.239	2.515	13,76	212	215	427	5,68
9	1.294	1.128	2.422	13,25	289	277	566	7,53
10	1.149	1.145	2.294	12,55	380	336	716	9,53
11	1.079	1.011	2.090	11,43	496	528	1.024	13,63
12	979	949	1.928	10,55	612	521	1.133	15,08
13	910	738	1.648	9,01	552	516	1.068	14,21
14	649	669	1.318	7,21	545	546	1.091	14,52
15	621	547	1.168	6,39	601	573	1.174	15,62
Jumlah	9.450	8.833	18.283	100,00	3.853	3.661	7.514	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

5. Perkembangan Penduduk Menurut Kelahiran dan Kematian

a. Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencanaan dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

Tabel IV.42 Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Rasanae Barat	266	22,11	271	24,37	537	23,20
2	Rasanae Timur	160	13,30	130	11,69	290	12,53
3	Asakota	252	20,95	242	21,76	494	21,34
4	Raba	252	20,95	228	20,50	480	20,73
5	Mpunda	273	22,69	241	21,67	514	22,20
	Jumlah	1.203	100,00	1.112	100,00	2.315	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Dari Tabel IV.42 dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran di Kota Bima tahun 2024 adalah sebanyak 2.315 kelahiran hidup, dengan kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat yaitu 537 terdiri dari laki-laki 266 anak dan perempuan 271 anak atau sebesar 23,20 % disusul Kecamatan Mpunda sebanyak 514 kelahiran hidup atau 22,20 %. Adapun kecamatan yang memiliki angka kelahiran hidup terendah adalah Kecamatan Rasanae Timur dengan angka 290 kelahiran hidup atau 12,53 %.

Bila dilihat dari proporsi tersebut jumlah kelahiran hidup yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan kelahiran perempuan. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya. Adapun angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Tabel IV.43 Angka Kelahiran Kasar per Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Kasar
	Kode	Nama		Awal Tahun	Tengah Tahun	Akhir Tahun	
1	52.72.01	Rasanae Barat	537	30.611	30.805	30.999	17,43
2	52.72.02	Rasanae Timur	290	19.833	20.081	20.328	14,44
3	52.72.03	Asakota	494	36.667	37.273	37.879	13,25
4	52.72.04	Raba	480	40.416	40.760	41.104	11,78
5	52.72.05	Mpunda	514	34.050	34.427	34.803	14,93
Jumlah			2.315	161.577	163.345	165.113	14,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Pada Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di Kota Bima ada 14,17 artinya terdapat 14-15 kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Angka kelahiran kasar tertinggi terdapat di Kecamatan Rasanae Barat dengan angka 17,43 yang artinya bahwa terdapat 17-18 kelahiran per 1.000 penduduk dan pada Kecamatan Raba merupakan angka kelahiran kasar terendah sebanyak 11,78 kelahiran artinya 11-12 kelahiran per 1.000 penduduk.

b. Angka Kelahiran Menurut umur (*Age Spesific Fertility Rate /ASFR*)

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, sehingga tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35-39 tahun. Terutama dengan tingkat kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Bima. Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yg berbeda. Sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (KB).

Tabel IV.44 Jumlah Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun) yang Sudah Kawin dan Melahirkan Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Perkawinan Perempuan Remaja (Usia 15-19 Tahun)		Jumlah Penduduk Perempuan Remaja (15-19 Tahun)	Jumlah Perempuan Remaja (15-19 Tahun) yang Sudah Melahirkan	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) dalam %
		Belum Kawin	Kawin			
1	Rasanae Barat	1.256	40	1.296	0	0,00
2	Rasanae Timur	763	26	789	0	0,00
3	Asakota	1.406	40	1.446	0	0,00
4	Raba	1.429	62	1.491	0	0,00
5	Mpunda	1.342	8	1.350	0	0,00
Jumlah		6.196	176	6.372	0	0,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2023



BAB V

KUALITAS DAN MOBILITAS PENDUDUK

Tingkat kualitas penduduk merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kualitas penduduk tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Jika kuantitas membicarakan tentang angka-angka yang berhubungan dengan jumlah penduduk, maka pada pembahasan kualitas ini kita akan berbicara tentang nilai atau mutu yang dimiliki penduduk. Kualitas penduduk tersebut sangat mempengaruhi terhadap tingkat kemajuan suatu daerah. Hal ini terkait dengan kemampuan penduduk dalam mengolah dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran warganya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain:

1. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan merupakan hal yang utama dan berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa kesehatan, manusia tidak akan dapat melaksanakan aktivitas kehidupan apapun. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kesehatannya, apalagi bila sejak kecil kesehatannya terganggu maka pertumbuhan psikologi/mental dan fisiknya akan terganggu juga, serta kinerja dan produktivitas penduduk akan berpengaruh.

2. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan. Kemajuan suatu negara dan wilayah tergantung dengan kualitas pendidikan dan sumber dayanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tinggi kualitas penduduk, sehingga akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam usaha meningkatkan taraf kesejahteraan.

3. Tingkat kesejahteraan penduduk

Kesejahteraan penduduk ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Hal tersebut terkait dengan pendapatan yang diperoleh penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan penduduk ini juga sangat berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

A. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan penduduk merupakan salah satu hal penting dalam menilai kualitas penduduk. Bila kesehatan tidak diperhatikan maka kualitas penduduk juga akan turut menurun. Hal tersebut dapat dilihat indikatornya dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran dapat dilihat dari data tentang angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total, rasio anak dan perempuan. Sedang aspek kematian dilihat dari data angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Selain itu, jaminan dan program kesehatan penduduk Kota Bima harus diperhatikan sehingga produktivitas dan kinerja penduduk tetap terjaga.

1. Aspek Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Jumlah kelahiran di Kota Bima pada tahun 2024 sebanyak 2.315 kelahiran hidup yang tersebar dalam lima kecamatan.

Tabel V.1 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Bima Tahun 2024

No	Kecamatan		Jumlah Anak 0-4 Tahun		Jumlah Perempuan 15-49 Tahun		Rasio Anak dan Perempuan
	Kode	Nama	n	%	n	%	
1	52.72.01	Rasanae Barat	2.119	16,77	8.458	18,84	25,05
2	52.72.02	Rasanae Timur	1.684	13,32	5.516	12,29	30,53
3	52.72.03	Asakota	3.170	25,08	10.468	23,32	30,28
4	52.72.04	Raba	3.109	24,60	10.915	24,32	28,48
5	52.72.05	Mpunda	2.557	20,23	9.531	21,23	26,83
Jumlah			12.639	100,00	44.888	100,00	28,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel di atas dilihat ada 12.639 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kota Bima, sedangkan jumlah perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 44.888 jiwa.

Hal di atas memperlihatkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 28 anak balita. Salah satu faktor yang menentukan tingkat laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah adalah tingkat kelahiran dan kematian, adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian penduduk rendah, sedangkan laju tingkat kelahiran tetap tinggi. Hal inilah yang merupakan penyebab utama ledakan jumlah penduduk (Prawirohardjo, 2010). Tingginya angka kelahiran merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan Keluarga Berencana (KB) (Kemenkes RI, 2014).

Keluarga Berencana (KB) adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval kehamilan, dan mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menemukan jumlah anak dalam keluarga (Suratun, dkk.,2008). Tujuan program KB adalah mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, di antaranya:

- Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut;
- Mencanangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak;
- Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini;
- Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua;
- Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Pengendalian kehamilan dalam program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Kemenkes RI, 2014). Penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita sebagai pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan serta keinginan bersama. Dalam hal ini bisa saja pria yang memakai kontrasepsi seperti kondom, dan vasektomi. Sementara itu apabila istri yang menggunakan kontrasepsi suami mempunyai peranan penting dalam mendukung istri dan menjamin efektivitas pemakaian kontrasepsi. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pengguna Alat Kontrasepsi di masing-masing kecamatan se-Kota Bima pada tahun 2024.

Tabel V.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di rinci menurut Kesertaan KB per Kecamatan

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)				Jumlah PUS	% PUS belum ber-KB
		Jumlah PUS Peserta KB	PUS Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) yang ber-KB	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani	Jumlah PUS yang belum ber-KB		
1	Rasanae Barat	2.318	1.870	528	1.907	6.623	36,77
2	Rasanae Timur	1.998	1.853	182	1.061	5.094	24,40
3	Asakota	3.078	3.141	500	2.246	8.965	30,63
4	Raba	3.173	3.099	463	2.287	9.022	30,48
5	Mpunda	2.385	1.970	409	2.222	6.986	37,66
Jumlah		12.952	11.933	2.082	9.723	36.690	32,17

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat/Metode KB						
		Suntik KB	Obat/Pil KB	IUD/Spiral	Susuk/Implant	Kondom	Vagina Diafragma	Spermatisida
1	Rasanae Barat	1.416	30	239	1.024	31	0	0
2	Rasanae Timur	1.739	15	200	994	4	0	0
3	Asakota	2.968	72	436	1.254	66	0	0
4	Raba	2.521	79	502	1.742	55	0	0
5	Mpunda	2.797	55	548	1.062	27	0	0
Jumlah		11.441	251	1.925	6.076	183	0	0

Lanjutan Tabel V.3 Jumlah Peserta KB di rinci berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat/Metode KB				Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah FASYANKES yang siap melayani MKJP
		Vasektomi	Tubektomi	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Total Peserta KB		
1	Rasanae Barat	86	9	1.358	4.193	212	11
2	Rasanae Timur	32	5	1.231	4.220	103	9
3	Asakota	103	6	1.799	6.704	222	10
4	Raba	155	3	2.402	7.459	460	20
5	Mpunda	90	2	1.702	6.283	185	12
Jumlah		466	25	8.492	28.859	1.182	62

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2024

Dari tabel V.3 terlihat bahwa pemakai alat kontrasepsi jenis suntik lebih mendominasi dari pemakaian alat kontrasepsi jenis lainnya, hampir separuh pengguna alat kontrasepsi menggunakan alkon jenis suntik. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap alat kontrasepsi suntik lebih aman dibandingkan dari alat kontrasepsi lainnya, walaupun sebenarnya apabila ditinjau secara medis memiliki tingkat keamanan yang sama. Selain itu jenis alat kontrasepsi ini diminati oleh pasutri usia muda mengingat penggunaan dalam jangka pendek ketika ingin memiliki anak kembali.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi adalah pengetahuan, dukungan suami dan pengalaman ber-KB. Dukungan suami juga mempengaruhi penggunaan kontrasepsi, karena istri yang mendapat dukungan dari suami akan menggunakan kontrasepsi secara terus menerus sedangkan yang tidak mendapatkan dukungan akan sedikit yang menggunakan kontrasepsi.

2. Aspek Kematian

Pada umumnya tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari besar kecilnya angka kematian yang terjadi di suatu daerah, hal tersebut berkaitan dengan kualitas kesehatan. Bila suatu daerah angka kematianya tinggi, maka perlu dilihat ketersediaan sarana kesehatan dan obat-obatan serta pola perilaku hidup penduduk tersebut. Hal itu akan berimplikasi terhadap kebijakan peningkatan sarana dan prasarana beserta SDM medisnya dan pelayanan Kesehatan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan, maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit system pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Angka kematian bayi/*Infant Mortality* adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neo Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur

satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian *Post Neonata*/adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau *post-neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel V.4 Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita

No	Uraian	Jumlah
1	Lahir Hidup	2.315
2	Kematian Bayi	25
3	Kematian Anak Balita	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.5 Jumlah Kematian Ibu (yang dilaporkan) dirinci per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu			Total Kematian Ibu
		Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Bersalin	Kematian Ibu Nifas	
1	Rasanae Barat	1	0	1	2
2	Rasanae Timur	0	0	0	0
3	Asakota	0	0	0	0
4	Raba	0	0	0	0
5	Mpunda	0	0	1	1
Jumlah		1	0	2	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi (yang dilaporkan) dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran						Total Kelahiran (Laki-laki + Perempuan)		
		Bayi Laki-laki			Bayi Perempuan					
		Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah	Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah	Lahir Hidup	Lahir Mati	Jumlah
1	Rasanae Barat	266	4	270	271	1	272	537	5	542
2	Rasanae Timur	160	0	160	130	1	131	290	1	291
3	Asakota	252	2	254	242	0	242	494	2	496
4	Raba	252	3	255	228	1	229	480	4	484
5	Mpunda	273	1	274	241	2	243	514	3	517
Jumlah		1.203	10	1.213	1.112	5	1.117	2.315	15	2.330

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.7 Jumlah Bayi di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Bayi = Neonatal + Post Neonatal						Jumlah Bayi (Neonatal + Post Neonatal)		
		Neonatal (usia 0-28 hari)			Post Neonatal (usia 29 hari - 11 bulan)					
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Rasanae Barat	270	272	542	290	244	534	560	516	1.076
2	Rasanae Timur	160	131	291	165	148	313	325	279	604
3	Asakota	254	242	496	299	305	604	553	547	1.100
4	Raba	255	229	484	324	299	623	579	528	1.107
5	Mpunda	274	243	517	293	236	529	567	479	1.046
Jumlah		1.213	1.117	2.330	1.371	1.232	2.603	2.584	2.349	4.933

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.8 Jumlah Anak Balita, dan Balita di Kota Bima di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Anak Balita dan Balita					
		Anak Balita (Usia 12 Bulan - 59 Bulan)			Balita (Usia 0 Bulan - 59 Bulan)		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Rasanae Barat	1.127	1.115	2.242	1.687	1.631	3.318
2	Rasanae Timur	675	660	1.335	1.000	939	1.939
3	Asakota	1.040	991	2.031	1.593	1.538	3.131
4	Raba	1.242	1.207	2.449	1.821	1.735	3.556
5	Mpunda	1.207	1.210	2.417	1.774	1.689	3.463
Jumlah		5.291	5.183	10.474	7.875	7.532	15.407

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.9 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita (yang dilaporkan) di rinci menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Kematian Balita (yang dilaporkan)									Kematian Anak Balita (Usia 12 - 59 bulan)			Kematian Balita (Usia 0 - 59 bulan)		
		Neonatal (usia 0-28 hari)			Post Neonatal (usia 29 hari - 11 bulan)			Total (Usia 0 - 11 Bulan)								
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Rasanae Barat	3	3	6	0	0	0	3	3	6	0	0	0	3	3	6
2	Rasanae Timur	2	1	3	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3
3	Asakota	1	1	2	1	1	2	2	2	4	0	0	0	2	2	4
4	Raba	3	0	3	0	0	0	3	0	3	1	0	1	4	0	4
5	Mpunda	7	2	9	0	0	0	7	2	9	0	0	0	7	2	9
Jumlah		16	7	23	1	1	2	17	8	25	1	0	1	18	8	26
Angka Kematian per 1,000 KH (dilaporkan)		AKN : 9,87			0,86			AKB : 10,73			AKABA : 0,42			6,86		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa selama tahun 2024, angka kematian bayi di Kota Bima masih tergolong tinggi karena terdapat 25 kematian bayi. Dari data tersebut dapat dihitung dan disimpulkan nilai AKB sebesar 10,73 yang artinya terdapat 11 kematian bayi dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Persoalan kematian bayi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tapi ini menjadi persoalan bersama di Pemerintah Kota Bima dan semua unsur yang terlibat.

3. Sosial

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Namun begitu juga sebaliknya bahwa setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang ada, baik biaya maupun sumber dayanya menjadikan kinerja dan kualitas hidup penduduk menjadi meningkat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019).

Tabel V.10 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis PMKS							Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar/ Anak Jalanan	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	Fakir Miskin	Pecandu Narkoba/ NAPZA	PMKS Lainnya	
1	Rasanae Barat	154	55	54	8	6.589	0	0	6.860
2	Rasanae Timur	98	35	34	4	4.195	0	0	4.366
3	Asakota	181	64	63	6	7.739	0	0	8.053
4	Raba	203	72	71	5	8.701	0	0	9.052
5	Mpunda	171	60	59	7	7.296	0	0	7.593
Jumlah		807	286	281	30	34.520	0	0	35.924

Sumber : Diskominfotik Kota Bima Tahun 2023

Tabel V.11 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng berdasarkan Data Terpadu FM-OTM Kota Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	119	127	107	20	373
2	Rasanae Timur	103	77	104	4	288
3	Asakota	130	114	131	6	381
4	Raba	253	54	164	16	487
5	Mpunda	149	90	110	4	353
Jumlah		754	462	616	50	1.882

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Menerima Paket Sandang di Kota Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	16	16	16	0	48
2	Rasanae Timur	16	16	16	1	49
3	Asakota	14	16	16	2	48
4	Raba	22	16	17	5	60
5	Mpunda	12	16	15	2	45
Jumlah		80	80	80	10	250

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Kecamatan	Jumlah PMKS Berdasarkan Data Terpadu FM-OTM				Total PMKS
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis (Gepeng)	
1	Rasanae Barat	4	7	47	0	58
2	Rasanae Timur	7	34	54	0	95
3	Asakota	8	58	50	0	116
4	Raba	15	34	60	0	109
5	Mpunda	15	26	38	0	79
Jumlah		49	159	249	0	457

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2024

Tabel V.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng (Luar Panti) yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Kecamatan	Penerima Manfaat PKH	Penerima Manfaat BPNT	Penerima Manfaat BPNT-PPKM	Penerima Manfaat PBI-JKN	Penerima Manfaat Jamkesda
1	Rasanae Barat	1.700	2.263	960	10.731	6.867
2	Rasanae Timur	2.154	2.854	852	10.589	4.028
3	Asakota	3.283	4.135	1.434	17.405	7.433
4	Raba	3.210	4.390	1.346	1.671	6.658
5	Mpunda	1.816	2.487	882	11.492	4.458
Jumlah		12.163	16.129	5.474	51.888	29.444

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2023

Hambatan, kesulitan dan gangguan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Aspek yang dominan terlihat pada kelompok fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, dan lanjut usia terlantar serta anak terlantar.

Jumlah total penduduk pemerlu layanan kesejahteraan sosial bukan menggambarkan jumlah individu itu sendiri, karna satu orang penduduk bisa saja masuk ke dalam beberapa kategori PMKS. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Permensos nomor 5 tahun 2019).

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kedisabilitasan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bima 165.113 jiwa maka persentase jumlah penduduk penyandang disabilitas tahun 2024 adalah 0,34 persen. Aspek penyandang disabilitas yang dominan terlihat pada kelompok disabilitas netra. Kelompok penduduk ini perlu mendapat perhatian dan mendapat pelayanan penuh dari pemerintah, baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan dan keterampilan. Sehingga dengan keterbatasannya, penyandang disabilitas dapat mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang bermartabat, memiliki hak dan akses yang sama dalam pelayanan publik, dan inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan Indonesia

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang disabilitas dirinci menurut jenis kelamin. Distribusi penduduk Kota Bima menurut jenis kedisabilitasan dan jenis kelamin per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel V.15.

Tabel V.15 Jumlah Penyandang Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Disabilitas Fisik	31	5,46	27	4,75	58	10,21
2	Disabilitas Netra	113	19,89	101	17,78	214	37,68
3	Disabilitas Rungu	32	5,63	26	4,58	58	10,21
4	Disabilitas Mental	108	19,01	67	11,80	175	30,81
5	Disabilitas Fisik dan Mental	6	1,06	1	0,18	7	1,23
6	Disabilitas Lainnya	33	5,81	23	4,05	56	9,86
Jumlah		323	56,87	245	43,13	568	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024

B. Aspek Pendidikan

Profil penduduk Kota Bima dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka Partisipasi Kasar/APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut.

Tabel V.16 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Bima, 2022 dan 2023

No	Kelompok Umur	2022	2023
1	15-19	100,00	100,00
2	20-24	100,00	99,27
3	25-29	100,00	100,00
4	30-34	98,04	99,61
5	35-39	94,72	100,00
6	40-44	92,60	98,25
7	45-49	95,36	97,56
8	50+	83,46	88,15
Jumlah			
	15-24	100,00	99,63
	15-44	97,68	99,54
	15+	93,70	96,35
	45+	86,46	90,50

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Tabel V.17 Angka Partisipasi Jenjang TK, KB/PAUD, SD, dan SMP di Kota Bima Tahun Pelajaran 2023/2024

Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar					
Angka Partisipasi Sekolah		APM, APK, dan APS					
Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Siswa/Peserta Didik				Angka Partisipasi	
		Jumlah Seluruh Siswa	Siswa Usia Sekolah				
TK/KB/PAUD (5 – 6 Tahun)	6.246	TK	3.951	3.951	APM	63,26	
		KB/PAUD	3.638	3.638	APM	58,26	
		Jumlah Siswa	7.589	7.589	APK	121,51	
SD (7 – 12 Tahun)	18.397	SD	15.661	15.661	APK	85,13	
		SMP	5.517	5.517	APM	85,13	
SMP (13 – 15 Tahun)	8.576				APK	64,33	
Kota Bima	33.219		28.767	-	APM	64,33	
					APS	86,60	

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima Tahun 2024

Secara umum cakupan layanan pendidikan di Kota Bima telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Selisih APK dan APM mengindikasikan adanya kelompok yang lambat jenjang (misalnya tidak naik kelas) atau terlalu cepat melampaui jenjang seharusnya (misalnya akselerasi atau masuk sekolah pada usia yang lebih muda dari batas umurnya). Dengan arti lain bahwa APK dan APM mengindikasikan proporsi murid yang tinggal kelas atau terlalu cepat sekolah.

C. Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi akan membahas tentang perbandingan dan jumlah tenaga kerja beserta angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Ekonomi yang dimiliki penduduk akan sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu wilayah, semakin tinggi ekonomi maka kualitasnya juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupan.

Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Diperkirakan setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai ribuan orang. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan mampu menhadirkan ketersediaan lapangan kerja yang banyak.

Tenaga kerja (*Manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula

Batas usia kerja penduduk yang berlaku pada profil perkembangan kependudukan Kota Bima ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Indikator ini berguna sebagai pertimbangan pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Tabel V.18 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
15-19	7.378	6,59	6.825	6,09	14.203	12,68
20-24	6.650	5,94	6.820	6,09	13.470	12,03
25-29	6.285	5,61	6.262	5,59	12.547	11,20
30-34	6.156	5,50	6.292	5,62	12.448	11,12
35-39	6.421	5,73	6.423	5,74	12.844	11,47
40-44	6.099	5,45	6.445	5,76	12.544	11,20
45-49	5.350	4,78	5.821	5,20	11.171	9,98
50-54	4.497	4,02	4.704	4,20	9.201	8,22
55-59	3.725	3,33	4.073	3,64	7.798	6,96
60-64	2.777	2,48	2.981	2,66	5.758	5,14
Jumlah	55.338	49,42	56.646	50,58	111.984	100,00
% Tenaga Kerja	33,52		34,31		67,82	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024

Dari tabel V.18 di atas nampak bahwa persentase tenaga kerja laki-laki lebih rendah (33,52 %) dibandingkan tenaga kerja perempuan (34,31 %). Lebih dari separuh jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2024 merupakan tenaga kerja (usia produktif) yakni sebanyak 67,82 %.

Menurut Partanto (2001), tenaga kerja dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penduduknya

Tenaga kerja berdasarkan jenis penduduk, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, yang mengelompokkan tenaga kerja merupakan mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan tenaga kerja

Dikatakan sebagai bukan tenaga kerja ialah mereka-mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja adalah penduduk yang diluar usia kerja, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun.

b. Berdasarkan Batas Kerja

Tenaga kerja berdasarkan batas kerjanya, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk produktif yang berusia 15 - 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan.

2. Bukan Angkatan Kerja

Dikatakan bukan angkatan kerja ialah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Sebagai contoh anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, serta para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan Kualitasnya

Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga Kerja Terdidik

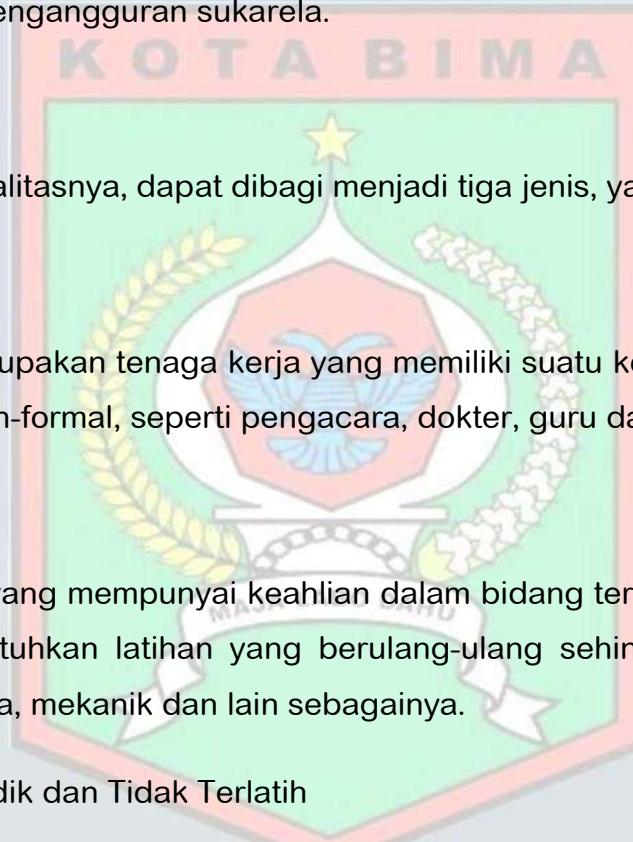
Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pendidikan formal dan non-formal, seperti pengacara, dokter, guru dan lain sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil tersebut membutuhkan latihan yang berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Seperti apoteker, ahli beda, mekanik dan lain sebagainya.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Yakni tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja, seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.



d. Berdasarkan Keahliannya

Tenaga kerja berdasarkan keahlian-nya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tenaga kerja kasar

Merupakan merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.

2. Tenaga kerja terampil

Merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki televisi dan radio.

3. Tenaga kerja terdidik

Yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi serta insinyur.

Menurut Simanjuntak (1985), aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa. Adapun dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang lalu mempunyai beberapa kegiatan seperti:

1. Sekolah, yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
2. Mengurus rumah tangga, yaitu yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu tanpa mendapatkan upah.
3. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan misalnya pensiunan, bunga simpanan dan sebagainya.
4. Mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani atau lainnya.

b. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha, instansi, dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

c. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang di produksinya.

d. Pasar Tenaga Kerja

Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha yang membutuhkan tenaga, pencari kerja, dan perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja ini merupakan turunan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan perubahan dari input atau masukan (faktor produksi) menjadi output atau keluaran.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Perluasan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja dikatakan cukup banyak, akan tetapi, angkatan kerja semakin bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup tinggi. Penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor untuk dapat menampung pertambahan angkatan kerja yang semakin banyak yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

b. Peningkatan Mutu dan Kemampuan Kerja

Secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Sehingga dalam meningkatkan kemampuan tersebut perlu dilakukan dengan melalui berbagai upaya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar didayagunakan semaksimal mungkin.

c. Penyebaran Tenaga Kerja

Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang merata baik secara sektoral maupun regional.

Secara regional penyebaran angkatan kerja masih bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata baik secara sektoral maupun regional akan menyulitkan penyediaan tenaga kerja secara maksimal.

d. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja ialah tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai dengan keahlian serta minatnya dan bukan pekerjaan yang dipaksakan.

Tabel V.19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bima dirinci per Wilayah Kecamatan, Tahun 2024

No	Kecamatan		Angkatan Kerja		Jumlah	TPT (%)
	Kode	Nama	Bekerja	Pengangguran		
1	52.72.01	Rasanae Barat	16.356	554	16.910	3,28
2	52.72.02	Rasanae Timur	10.659	361	11.020	3,28
3	52.72.03	Asakota	19.395	656	20.051	3,27
4	52.72.04	Raba	21.794	737	22.531	3,27
5	52.72.05	Mpunda	18.282	619	18.901	3,27
Jumlah			86.486	2.927	89.413	3,27

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel V.20 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Bukan Angkatan Kerja

No	Kecamatan		Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
	Kode	Nama	L	P	L	P	L	P	L	P
1	52.72.01	Rasanae Barat	966	1.065	497	3.398	778	224	2.241	4.687
2	52.72.02	Rasanae Timur	590	734	330	2.118	507	142	1.427	2.994
3	52.72.03	Asakota	1.172	1.234	539	3.645	852	193	2.563	5.072
4	52.72.04	Raba	1.244	1.294	717	4.623	1.084	328	3.045	6.245
5	52.72.05	Mpunda	1.039	1.146	558	3.709	863	224	2.460	5.079
Jumlah			5.011	5.473	2.641	17.493	4.084	1.111	11.736	24.077

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel V.21 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Kecamatan		Angkatan Kerja						Bukan Angkatan Kerja							
		Bekerja		Pengangguran		Jumlah		Sekolah		Mengurus Rumah Tangga		Lainnya		Jumlah	
Kode	Nama	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
52.72.01	Rasanae Barat	96,76	95,59	3,24	4,41	100,00	100,00	43,11	22,72	22,18	72,50	34,72	4,78	100,00	100,00
52.72.02	Rasanae Timur	96,54	95,14	3,46	4,86	100,00	100,00	41,35	24,52	23,13	70,74	35,53	4,74	100,00	100,00
52.72.03	Asakota	96,76	95,41	3,24	4,59	100,00	100,00	45,73	24,33	21,03	71,87	33,24	3,81	100,00	100,00
52.72.04	Raba	96,97	95,79	3,03	4,21	100,00	100,00	40,85	20,72	23,55	74,03	35,60	5,25	100,00	100,00
52.72.05	Mpunda	96,87	95,72	3,13	4,28	100,00	100,00	42,24	22,56	22,68	73,03	35,08	4,41	100,00	100,00
Jumlah		96,81	95,58	3,19	4,42	100,00	100,00	42,70	22,73	22,50	72,65	34,80	4,61	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima Tahun 2023

Tabel V.22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Total Angkatan Kerja dan Total Bukan Angkatan Kerja

No	Kecamatan		Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			
	Kode	Nama	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1	52.72.01	Rasanae Barat	96,24	3,76	100,00	29,32	56,22	14,46	100,00
2	52.72.02	Rasanae Timur	95,93	4,07	100,00	29,95	55,37	14,68	100,00
3	52.72.03	Asakota	96,17	3,83	100,00	31,51	54,80	13,69	100,00
4	52.72.04	Raba	96,45	3,55	100,00	27,32	57,48	15,20	100,00
5	52.72.05	Mpunda	96,36	3,64	100,00	28,98	56,60	14,42	100,00
Jumlah			96,26	3,74	100,00	29,27	56,22	14,51	100,00

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel V.23 Jumlah Penduduk Usia Kerja

No	Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
1	< SD	99,01	0,99	100,00	6,28	69,68	24,04	100,00
2	SMP/Paket B	100,00	0,00	100,00	67,38	25,78	6,84	100,00
3	SMA/Paket C	95,40	4,60	100,00	23,27	62,20	14,53	100,00
4	SMK	95,98	4,02	100,00	0,00	88,28	11,72	100,00
5	Diploma I/II/III	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	Universitas	93,88	6,12	100,00	5,49	67,96	26,55	100,00
Kota Bima		92,26	3,74	100,00	29,27	56,22	14,51	100,00

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima 2023

Tabel IV.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	27.420	16,607	22.662	13,725	50.082	30,332
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0,000	34.203	20,715	34.203	20,715
3	PELAJAR/MAHASISWA	15.444	9,354	13.658	8,272	29.102	17,626
4	PENSIUNAN	1.345	0,815	532	0,322	1.877	1,137
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	3.638	2,203	3.036	1,839	6.674	4,042
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	312	0,189	0	0,000	312	0,189
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	725	0,439	11	0,007	736	0,446
8	PERDAGANGAN	199	0,121	182	0,110	381	0,231
9	PETANI/PEKEBUN	7.451	4,513	144	0,087	7.595	4,600
10	PETERNAK	30	0,018	3	0,002	33	0,020
11	NELAYAN/PERIKANAN	1.144	0,693	6	0,004	1.150	0,696
12	INDUSTRI	6	0,004	3	0,002	9	0,005
13	KONSTRUKSI	14	0,008	1	0,001	15	0,009
14	TRANSPORTASI	319	0,193	0	0,000	319	0,193
15	KARYAWAN SWASTA	3.407	2,063	1.064	0,644	4.471	2,708
16	KARYAWAN BUMN	400	0,242	168	0,102	568	0,344
17	KARYAWAN BUMD	68	0,041	35	0,021	103	0,062
18	KARYAWAN HONORER	2.311	1,400	2.665	1,614	4.976	3,014
19	BURUH HARIAN LEPAS	1.437	0,870	11	0,007	1.448	0,877
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.425	0,863	27	0,016	1.452	0,879
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	65	0,039	0	0,000	65	0,039
22	BURUH PETERNAKAN	14	0,008	2	0,001	16	0,010
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0,000	58	0,035	58	0,035

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
24	TUKANG CUKUR	9	0,005	0	0,000	9	0,005
25	TUKANG LISTRIK	14	0,008	0	0,000	14	0,008
26	TUKANG BATU	532	0,322	0	0,000	532	0,322
27	TUKANG KAYU	455	0,276	0	0,000	455	0,276
28	TUKANG SOL SEPATU	3	0,002	1	0,001	4	0,002
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	35	0,021	0	0,000	35	0,021
30	TUKANG JAHIT	37	0,022	46	0,028	83	0,050
31	TUKANG GIGI	2	0,001	0	0,000	2	0,001
32	PENATA RIAS	3	0,002	3	0,002	6	0,004
33	PENATA BUSANA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
34	PENATA RAMBUT	3	0,002	4	0,002	7	0,004
35	MEKANIK	119	0,072	0	0,000	119	0,072
36	SENIMAN	10	0,006	2	0,001	12	0,007
37	TABIB	2	0,001	0	0,000	2	0,001
38	PARAJI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
39	PERANCANG BUSANA	0	0,000	1	0,001	1	0,001
40	PENTERJEMAH	1	0,001	0	0,000	1	0,001
41	IMAM MASJID	5	0,003	0	0,000	5	0,003
42	PENDETA	7	0,004	0	0,000	7	0,004
43	PASTOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
44	WARTAWAN	40	0,024	1	0,001	41	0,025
45	USTADZ/MUBALIGH	1	0,001	2	0,001	3	0,002
46	JURU MASAK	0	0,000	2	0,001	2	0,001
47	PROMOTOR ACARA	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
48	ANGGOTA DPR RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
49	ANGGOTA DPD RI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
50	ANGGOTA BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
51	PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
52	WAKIL PRESIDEN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
55	DUTA BESAR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
56	GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
57	WAKIL GUBERNUR	0	0,000	0	0,000	0	0,000
58	BUPATI	0	0,000	1	0,001	1	0,001
59	WAKIL BUPATI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
60	WALIKOTA	1	0,001	0	0,000	1	0,001
61	WAKIL WALIKOTA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
62	ANGGOTA DPRD PROP.	2	0,001	0	0,000	2	0,001
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	16	0,010	3	0,002	19	0,012
64	DOSEN	191	0,116	133	0,081	324	0,196
65	GURU	538	0,326	1.015	0,615	1.553	0,941
66	PILOT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
67	PENGACARA	31	0,019	3	0,002	34	0,021
68	NOTARIS	6	0,004	5	0,003	11	0,007
69	ARSITEK	1	0,001	0	0,000	1	0,001
70	AKUNTAN	1	0,001	0	0,000	1	0,001
71	KONSULTAN	11	0,007	1	0,001	12	0,007

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
72	DOKTER	57	0,035	77	0,047	134	0,081
73	BIDAN	0	0,000	183	0,111	183	0,111
74	PERAWAT	65	0,039	181	0,110	246	0,149
75	APOTEKER	10	0,006	15	0,009	25	0,015
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0,000	1	0,001	1	0,001
77	PENYIAR TELEVISI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
78	PENYIAR RADIO	1	0,001	0	0,000	1	0,001
79	PELAUT	77	0,047	0	0,000	77	0,047
80	PENELITI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
81	SOPIR	671	0,406	0	0,000	671	0,406
82	PIALANG	1	0,001	0	0,000	1	0,001
83	PARANORMAL	0	0,000	0	0,000	0	0,000
84	PEDAGANG	253	0,153	285	0,173	538	0,326
85	PERANGKAT DESA	1	0,001	1	0,001	2	0,001
86	KEPALA DESA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	0,000	3	0,002	3	0,002
88	WIRASWASTA	11.924	7,222	2.318	1,404	14.242	8,626
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
90	ARTIS	0	0,000	0	0,000	0	0,000
91	ATLIT	0	0,000	0	0,000	0	0,000
92	CHEFF	0	0,000	0	0,000	0	0,000
93	MANAJER	0	0,000	0	0,000	0	0,000
94	TENAGA TATA USAHA	0	0,000	0	0,000	0	0,000
95	OPERATOR	0	0,000	0	0,000	0	0,000

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0,000	0	0,000	0	0,000
97	TEKNISI	1	0,001	0	0,000	1	0,001
98	ASISTEN AHLI	0	0,000	0	0,000	0	0,000
99	PEKERJAAN LAINNYA	26	0,016	16	0,010	42	0,025
Jumlah		82.338	49,868	82.775	50,132	165.113	100,000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah



BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan dan sebagainya. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan.

Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database kependudukan sesuai dengan dokumen dan realitas yang dimiliki penduduk.

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan hukum secara sah, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang syah dan mempunyai kedudukan hukum keluarga tersebut bertempat tinggal. Pada tahun 2023 ini penandatanganan Kartu Keluarga dan Akta-Akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penandatanganan ini syah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotokopi dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut.

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu Keluarga (KK) memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesantrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu rumah tangga boleh terdapat lebih dari satu Kepala Keluarga.

Tabel VI.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepala Keluarga			Telah Cetak Kartu Keluarga				Belum Cetak Kartu Keluarga			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	Kota Bima	41.562	11.004	52.566	41.424	10.901	52.325	99,54	138	103	241	0,46
52.72.01	Rasanae Barat	7.556	2.511	10.067	7.528	2.483	10.011	99,44	28	28	56	0,56
52.72.01.1001	Paruga	1.331	449	1.780	1.325	446	1.771	99,49	6	3	9	0,51
52.72.01.1002	Nae	1.009	360	1.369	1.007	357	1.364	99,63	2	3	5	0,37
52.72.01.1003	Sarae	1.242	396	1.638	1.237	393	1.630	99,51	5	3	8	0,49
52.72.01.1004	Tanjung	1.599	521	2.120	1.592	512	2.104	99,25	7	9	16	0,75
52.72.01.1013	Pane	647	287	934	647	281	928	99,36	0	6	6	0,64
52.72.01.1014	Dara	1.728	498	2.226	1.720	494	2.214	99,46	8	4	12	0,54
52.72.02	Rasanae Timur	5.489	1.248	6.737	5.470	1.233	6.703	99,50	19	15	34	0,50
52.72.02.1004	Kumbe	1.063	293	1.356	1.058	291	1.349	99,48	5	2	7	0,52
52.72.02.1008	Lampe	445	93	538	444	89	533	99,07	1	4	5	0,93
52.72.02.1009	Dodu	913	212	1.125	911	209	1.120	99,56	2	3	5	0,44
52.72.02.1011	Nungga	701	135	836	698	133	831	99,40	3	2	5	0,60
52.72.02.1018	Kodo	597	167	764	596	167	763	99,87	1	0	1	0,13
52.72.02.1019	Oi Fo'o	639	103	742	638	103	741	99,87	1	0	1	0,13
52.72.02.1020	Lelamase	613	113	726	609	111	720	99,17	4	2	6	0,83
52.72.02.1021	Oimbo	518	132	650	516	130	646	99,38	2	2	4	0,62
52.72.03	Asakota	9.421	2.102	11.523	9.377	2.085	11.462	99,47	44	17	61	0,53
52.72.03.1001	Melayu	1.353	449	1.802	1.343	448	1.791	99,39	10	1	11	0,61
52.72.03.1002	Jatiwangi	1.950	423	2.373	1.945	423	2.368	99,79	5	0	5	0,21
52.72.03.1003	Jatibaru	1.623	365	1.988	1.610	359	1.969	99,04	13	6	19	0,96
52.72.03.1004	Kolo	1.595	321	1.916	1.590	316	1.906	99,48	5	5	10	0,52
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.197	256	1.453	1.195	254	1.449	99,72	2	2	4	0,28
52.72.03.1006	Ule	1.703	288	1.991	1.694	285	1.979	99,40	9	3	12	0,60

Kode	Wilayah	Kepala Keluarga			Telah Cetak Kartu Keluarga				Belum Cetak Kartu Keluarga			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.04	Raba	10.520	2.952	13.472	10.496	2.928	13.424	99,64	24	24	48	0,36
52.72.04.1001	Penaraga	1.251	427	1.678	1.247	423	1.670	99,52	4	4	8	0,48
52.72.04.1002	Rontu	879	242	1.121	877	241	1.118	99,73	2	1	3	0,27
52.72.04.1003	Penanae	1.076	294	1.370	1.073	292	1.365	99,64	3	2	5	0,36
52.72.04.1004	Kendo	463	90	553	462	89	551	99,64	1	1	2	0,36
52.72.04.1005	Ntobo	1.096	224	1.320	1.094	223	1.317	99,77	2	1	3	0,23
52.72.04.1006	Nitu	448	74	522	446	74	520	99,62	2	0	2	0,38
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.036	278	1.314	1.032	276	1.308	99,54	4	2	6	0,46
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	998	308	1.306	996	306	1.302	99,69	2	2	4	0,31
52.72.04.1009	Rite	641	147	788	640	145	785	99,62	1	2	3	0,38
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.400	469	1.869	1.399	466	1.865	99,79	1	3	4	0,21
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.232	399	1.631	1.230	393	1.623	99,51	2	6	8	0,49
52.72.05	Mpunda	8.576	2.191	10.767	8.553	2.172	10.725	99,61	23	19	42	0,39
52.72.05.1001	Monggonao	1.021	301	1.322	1.019	298	1.317	99,62	2	3	5	0,38
52.72.05.1002	Sadia	941	227	1.168	935	226	1.161	99,40	6	1	7	0,60
52.72.05.1003	Santi	703	162	865	700	160	860	99,42	3	2	5	0,58
52.72.05.1004	Sambinae	961	198	1.159	959	196	1.155	99,65	2	2	4	0,35
52.72.05.1005	Penatoi	1.160	339	1.499	1.158	337	1.495	99,73	2	2	4	0,27
52.72.05.1006	Lewirato	500	139	639	500	139	639	100,00	0	0	0	0,00
52.72.05.1007	Mande	717	229	946	715	228	943	99,68	2	1	3	0,32
52.72.05.1008	Panggi	722	169	891	722	165	887	99,55	0	4	4	0,45
52.72.05.1009	Manggemaci	1.064	287	1.351	1.059	284	1.343	99,41	5	3	8	0,59
52.72.05.1010	Matakando	787	140	927	786	139	925	99,78	1	1	2	0,22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Dikatakan Kepemilikan Kartu keluarga apabila Kepala Keluarga melakukan pencetakan pertama Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing Kabupaten/Kota. Tabel VI.1 menunjukkan jumlah kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Bima 99,54 %. Salah satu penyebabnya kepemilikan kartu keluarga ini tidak 100 % dikarenakan pada saat pencatatan peristiwa kematian kepala keluarga, akan mengakibatkan pemecahan kepala keluarga. Dalam pencatatan peristiwa kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan tidak hanya dari laporan ahli waris (keluarga) saja tetapi juga berdasarkan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID) yang disampaikan oleh Kelurahan setiap bulannya. Sementara untuk penerbitan akta kematian dan pembaharuan Kartu Keluarga dilakukan apabila ahli waris dan kader yang telah ditunjuk melengkapi bahan dan persyaratan penerbitan kedua dokumen tersebut

Pada tabel VI.1 di atas, jumlah keluarga di Kota Bima sebanyak 52.566 keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki 41.562 kepala keluarga dan kepala keluarga perempuan berjumlah 11.004 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kelurahan Jatiwangi yaitu sebesar 2.373 KK, sedang jumlah kepala keluarga terkecil adalah Kelurahan Nitu sebesar 522 KK.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin. Dalam buku profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 47 menyajikan jumlah wajib KTP el dan capaian perekaman KTP El.

Cakupan kepemilikan KTP-el merupakan salah satu target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia (Nasional) bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah. Tentunya kepemilikan KTP-el ini diawali dengan proses perekaman KTP-el.

Tabel VI.2 Jumlah dan Capaian Pencetakan KTP Elektronik per Kelurahan

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	56.921	59.432	116.353	56.558	59.108	115.666	99,41	363	324	687	0,59
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	10.737	11.254	21.991	10.663	11.183	21.846	99,34	74	71	145	0,66
52.72.01.1001	Paruga	1.883	1.939	3.822	1.871	1.926	3.797	99,35	12	13	25	0,65
52.72.01.1002	Nae	1.472	1.629	3.101	1.468	1.626	3.094	99,77	4	3	7	0,23
52.72.01.1003	Sarae	1.815	1.855	3.670	1.798	1.842	3.640	99,18	17	13	30	0,82
52.72.01.1004	Tanjung	2.255	2.308	4.563	2.236	2.289	4.525	99,17	19	19	38	0,83
52.72.01.1013	Pane	938	1.032	1.970	933	1.030	1.963	99,64	5	2	7	0,36
52.72.01.1014	Dara	2.374	2.491	4.865	2.357	2.470	4.827	99,22	17	21	38	0,78
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	7.053	7.364	14.417	7.016	7.332	14.348	99,52	37	32	69	0,48
52.72.02.1004	Kumbe	1.408	1.475	2.883	1.400	1.469	2.869	99,51	8	6	14	0,49
52.72.02.1008	Lampe	575	604	1.179	573	601	1.174	99,58	2	3	5	0,42
52.72.02.1009	Dodu	1.167	1.223	2.390	1.162	1.218	2.380	99,58	5	5	10	0,42
52.72.02.1011	Nungga	887	923	1.810	883	919	1.802	99,56	4	4	8	0,44
52.72.02.1018	Kodo	787	859	1.646	786	855	1.641	99,70	1	4	5	0,30
52.72.02.1019	Oi Fo'o	792	797	1.589	784	793	1.577	99,24	8	4	12	0,76
52.72.02.1020	Lelamase	754	799	1.553	749	796	1.545	99,48	5	3	8	0,52
52.72.02.1021	Oimbo	683	684	1.367	679	681	1.360	99,49	4	3	7	0,51

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.03	Asakota	12.952	13.036	25.988	12.854	12.949	25.803	99,29	98	87	185	0,71
52.72.03.1001	Melayu	1.970	2.075	4.045	1.956	2.058	4.014	99,23	14	17	31	0,77
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.693	2.726	5.419	2.676	2.704	5.380	99,28	17	22	39	0,72
52.72.03.1003	Jatibaru	2.196	2.151	4.347	2.179	2.140	4.319	99,36	17	11	28	0,64
52.72.03.1004	Kolo	2.226	2.195	4.421	2.208	2.182	4.390	99,30	18	13	31	0,70
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.561	1.577	3.138	1.545	1.566	3.111	99,14	16	11	27	0,86
52.72.03.1006	Ule	2.306	2.312	4.618	2.290	2.299	4.589	99,37	16	13	29	0,63
52.72.04	Raba	14.222	15.152	29.374	14.144	15.088	29.232	99,52	78	64	142	0,48
52.72.04.1001	Penaraga	1.814	1.937	3.751	1.804	1.925	3.729	99,41	10	12	22	0,59
52.72.04.1002	Rontu	1.145	1.220	2.365	1.141	1.216	2.357	99,66	4	4	8	0,34
52.72.04.1003	Penanae	1.508	1.535	3.043	1.496	1.531	3.027	99,47	12	4	16	0,53
52.72.04.1004	Kendo	575	591	1.166	571	591	1.162	99,66	4	0	4	0,34
52.72.04.1005	Ntobo	1.416	1.448	2.864	1.407	1.441	2.848	99,44	9	7	16	0,56
52.72.04.1006	Nitu	578	582	1.160	572	577	1.149	99,05	6	5	11	0,95
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.410	1.531	2.941	1.403	1.525	2.928	99,56	7	6	13	0,44
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.331	1.465	2.796	1.327	1.457	2.784	99,57	4	8	12	0,43
52.72.04.1009	Rite	867	909	1.776	865	904	1.769	99,61	2	5	7	0,39
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.845	2.047	3.892	1.834	2.042	3.876	99,59	11	5	16	0,41
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.733	1.887	3.620	1.724	1.879	3.603	99,53	9	8	17	0,47

Kode	Wilayah	Wajib KTP			Sudah Cetak KTP				Belum Cetak KTP			
		L	P	JML	L	P	JML	%	L	P	JML	%
52.72.05	Mpunda	11.957	12.626	24.583	11.881	12.556	24.437	99,41	76	70	146	0,59
52.72.05.1001	Monggonao	1.461	1.545	3.006	1.452	1.538	2.990	99,47	9	7	16	0,53
52.72.05.1002	Sadia	1.354	1.447	2.801	1.346	1.436	2.782	99,32	8	11	19	0,68
52.72.05.1003	Santi	974	1.024	1.998	970	1.016	1.986	99,40	4	8	12	0,60
52.72.05.1004	Sambinae	1.257	1.293	2.550	1.247	1.289	2.536	99,45	10	4	14	0,55
52.72.05.1005	Penatoi	1.663	1.784	3.447	1.650	1.771	3.421	99,25	13	13	26	0,75
52.72.05.1006	Lewirato	722	724	1.446	718	718	1.436	99,31	4	6	10	0,69
52.72.05.1007	Mande	987	1.097	2.084	981	1.095	2.076	99,62	6	2	8	0,38
52.72.05.1008	Panggi	1.009	1.077	2.086	1.004	1.075	2.079	99,66	5	2	7	0,34
52.72.05.1009	Manggemaci	1.480	1.554	3.034	1.469	1.542	3.011	99,24	11	12	23	0,76
52.72.05.1010	Matakando	1.050	1.081	2.131	1.044	1.076	2.120	99,48	6	5	11	0,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Beragam permasalahan yang menyebabkan masyarakat belum mempunyai KTP-el dan perekaman KTP-el diantaranya adalah berada diluar domisili, lanjut usia, penyandang disabilitas, rendahnya tingkat kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan KTP. Berangkat dari permasalahan tersebut dan seiring dengan target nasional tentang kememilikan KTP-el maka berbagai upaya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui inovasi-inovasi. Selain memberdayakan sumber daya yang ada pada Disdukcapil juga melibatkan *stakeholder* terkait yang dapat membantu dalam pencapaian target dimaksud.

Tabel VI.2 di atas menyajikan capaian kepemilikan KTP el dari total wajib KTP el. Dapat dilihat bahwa capaian kepemilikan KTP 99,29 %, dengan capaian tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Timur dan Raba 99,52 % dan capaian terendah di Kecamatan Asakota 99,29 %. Perlu dorongan dan dukungan dari semua pihak mengimbau masyarakat untuk perekaman KTP el guna penerbitan KTP el yang bersangkutan.

C. Penerbitan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta pencatatan sipil dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak; dan (6) pengesahan anak.

1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti syah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya.

Tabel VI.3 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Bima terhadap total penduduk Kota Bima. Dari tabel di bawah terlihat bahwa Penduduk Kota Bima yang memiliki akta kelahiran adalah 96.214 jiwa (56,27 %).

Tabel VI.3 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir			
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	Kota Bima	165.113	96.214	68.899	58,27
52.72.01	Rasanae Barat	30.999	17.015	13.984	54,89
52.72.01.1001	Paruga	5.307	2.819	2.488	53,12
52.72.01.1002	Nae	4.303	2.417	1.886	56,17
52.72.01.1003	Sarae	5.165	2.824	2.341	54,68
52.72.01.1004	Tanjung	6.541	3.576	2.965	54,67
52.72.01.1013	Pane	2.705	1.478	1.227	54,64
52.72.01.1014	Dara	6.978	3.901	3.077	55,90
52.72.02	Rasanae Timur	20.328	12.381	7.947	60,91
52.72.02.1004	Kumbe	4.000	2.351	1.649	58,78
52.72.02.1008	Lampe	1.684	1.107	577	65,74
52.72.02.1009	Dodu	3.378	2.019	1.359	59,77
52.72.02.1011	Nungga	2.597	1.508	1.089	58,07
52.72.02.1018	Kodo	2.283	1.387	896	60,75
52.72.02.1019	Oi Fo'o	2.334	1.562	772	66,92
52.72.02.1020	Lelamase	2.163	1.315	848	60,80
52.72.02.1021	Oimbo	1.889	1.132	757	59,93
52.72.03	Asakota	37.879	22.424	15.455	59,20
52.72.03.1001	Melayu	5.883	3.444	2.439	58,54
52.72.03.1002	Jatiwangi	7.824	4.490	3.334	57,39
52.72.03.1003	Jatibaru	6.221	3.576	2.645	57,48
52.72.03.1004	Kolo	6.444	3.964	2.480	61,51
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	4.338	2.528	1.810	58,28
52.72.03.1006	Ule	7.169	4.422	2.747	61,68

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir			
		Jumlah Penduduk	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.04	Raba	41.104	24.120	16.984	58,68
52.72.04.1001	Penaraga	5.283	3.126	2.157	59,17
52.72.04.1002	Rontu	3.391	2.045	1.346	60,31
52.72.04.1003	Penanae	4.326	2.578	1.748	59,59
52.72.04.1004	Kendo	1.643	1.106	537	67,32
52.72.04.1005	Ntobo	3.994	2.379	1.615	59,56
52.72.04.1006	Nitu	1.629	1.057	572	64,89
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	4.151	2.284	1.867	55,02
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	3.833	2.149	1.684	56,07
52.72.04.1009	Rite	2.518	1.448	1.070	57,51
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	5.385	3.179	2.206	59,03
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	4.951	2.769	2.182	55,93
52.72.05	Mpunda	34.803	20.274	14.529	58,25
52.72.05.1001	Monggonao	4.136	2.288	1.848	55,32
52.72.05.1002	Sadia	3.883	2.202	1.681	56,71
52.72.05.1003	Santi	2.903	1.714	1.189	59,04
52.72.05.1004	Sambinae	3.677	2.193	1.484	59,64
52.72.05.1005	Penatoi	4.951	2.898	2.053	58,53
52.72.05.1006	Lewirato	1.996	1.089	907	54,56
52.72.05.1007	Mande	2.979	1.743	1.236	58,51
52.72.05.1008	Panggi	2.865	1.722	1.143	60,10
52.72.05.1009	Manggemaci	4.299	2.531	1.768	58,87
52.72.05.1010	Matakando	3.114	1.894	1.220	60,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Salah satu target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara nasional adalah kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun, dimana dalam rangka untuk mencapai target tersebut dilakukan beberapa program dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-17 tahun melalui inovasi-inovasi terkait.

Tabel VI.4 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	Kota Bima	51.471	50.948	523	98,98
52.72.01	Rasanae Barat	9.553	9.418	135	98,59
52.72.01.1001	Paruga	1.579	1.561	18	98,86
52.72.01.1002	Nae	1.270	1.264	6	99,53
52.72.01.1003	Sarae	1.583	1.563	20	98,74
52.72.01.1004	Tanjung	2.105	2.053	52	97,53
52.72.01.1013	Pane	787	784	3	99,62
52.72.01.1014	Dara	2.229	2.193	36	98,38
52.72.02	Rasanae Timur	6.233	6.189	44	99,29
52.72.02.1004	Kumbe	1.180	1.167	13	98,90
52.72.02.1008	Lampe	530	527	3	99,43
52.72.02.1009	Dodu	1.052	1.044	8	99,24
52.72.02.1011	Nungga	832	830	2	99,76
52.72.02.1018	Kodo	663	659	4	99,40
52.72.02.1019	Oi Fo'o	786	781	5	99,36
52.72.02.1020	Lelamase	643	638	5	99,22
52.72.02.1021	Oimbo	547	543	4	99,27

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.03	Asakota	12.536	12.400	136	98,92
52.72.03.1001	Melayu	1.948	1.924	24	98,77
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.531	2.511	20	99,21
52.72.03.1003	Jatibaru	1.993	1.971	22	98,90
52.72.03.1004	Kolo	2.113	2.087	26	98,77
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.265	1.246	19	98,50
52.72.03.1006	Ule	2.686	2.661	25	99,07
52.72.04	Raba	12.383	12.256	127	98,97
52.72.04.1001	Penaraga	1.620	1.581	39	97,59
52.72.04.1002	Rontu	1.068	1.056	12	98,88
52.72.04.1003	Penanae	1.361	1.352	9	99,34
52.72.04.1004	Kendo	504	501	3	99,40
52.72.04.1005	Ntobo	1.190	1.185	5	99,58
52.72.04.1006	Nitu	505	500	5	99,01
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.276	1.265	11	99,14
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.083	1.072	11	98,98
52.72.04.1009	Rite	781	779	2	99,74
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.584	1.567	17	98,93
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.411	1.398	13	99,08

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-17 Tahun			
		Usia 0-17 Tahun	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.05	Mpunda	10.766	10.685	81	99,25
52.72.05.1001	Monggonao	1.182	1.175	7	99,41
52.72.05.1002	Sadia	1.148	1.142	6	99,48
52.72.05.1003	Santi	940	934	6	99,36
52.72.05.1004	Sambinae	1.175	1.166	9	99,23
52.72.05.1005	Penatoi	1.596	1.578	18	98,87
52.72.05.1006	Lewirato	587	582	5	99,15
52.72.05.1007	Mande	944	939	5	99,47
52.72.05.1008	Panggi	820	818	2	99,76
52.72.05.1009	Manggemaci	1.341	1.327	14	98,96
52.72.05.1010	Matakando	1.033	1.024	9	99,13

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Berkat kerja sama dan bantuan semua pihak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 98,98 %.

2. Akta Kematian

Setiap kematian warga Negara wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana pencatatan sipil setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sesuai amanat Undang-Undang 24 tahun 2013 pasal 44 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan amanat Undang-undang tersebut di atas maka penerbitan akte kematian merupakan salah satu target capain yang harus dicapai oleh setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Penerbitan Akta Kematian ini sangat berhubungan erat sekali terhadap valid atau tidaknya *database* kependudukan karena apabila kematian setiap warga negara tidak dilaporkan untuk diterbitkan akte kematianya maka akan muncul masalah dikemudian hari dimana data masyarakat yang bersangkutan masih tercatat aktif/hidup. Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Bima yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi “Warda Warta”/Wara Bidan Wara Akta. Inovasi ini bekerja sama dengan seluruh bidan di Kota Bima guna mendapatkan informasi/data jumlah penduduk lahir mati untuk dikonsolidasikan dengan data dari Dikes.

Tabel VI.5 Jumlah Penerbitan Akta Kematian s.d.Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Akta Kematian
1	Rasanae Barat	2.039
2	Rasanae Timur	1.199
3	Asakota	1.649
4	Raba	2.751
5	Mpunda	1.766
Total		9.404

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Akta Kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital mempermudah masyarakat dalam mengurus Akta Kematian melalui gadget dalam genggaman masyarakat langsung.

Sementara untuk penerbitan akte kematian dapat dilakukan setelah persyaratan untuk menerbitkan akte kematianya dilengkapi oleh keluarga maupun kader percepatan akta yang telah ditunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya.

Dari tabel VI.6 dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki akta perkawinan 57.484 jiwa (76,44 %) dari jumlah penduduk berstatus kawin 75.198 jiwa. Angka kepemilikan akta perkawinan tertinggi berada di Kecamatan Asakota sebanyak 13.891 jiwa (80,17 %) dan terendah di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 9.511 jiwa (72,66 %).

Tabel VI.6 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber- Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	<i>Kota Bima</i>	75.198	57.484	17.714	76,44
52.72.01	<i>Rasanae Barat</i>	13.089	9.511	3.578	72,66
52.72.01.1001	Paruga	2.250	1.632	618	72,53
52.72.01.1002	Nae	1.799	1.347	452	74,87
52.72.01.1003	Sarae	2.130	1.579	551	74,13
52.72.01.1004	Tanjung	2.733	1.901	832	69,56
52.72.01.1013	Pane	1.105	792	313	71,67
52.72.01.1014	Dara	3.072	2.260	812	73,57
52.72.02	<i>Rasanae Timur</i>	10.028	7.411	2.617	73,90
52.72.02.1004	Kumbe	1.877	1.349	528	71,87
52.72.02.1008	Lampe	795	592	203	74,47
52.72.02.1009	Dodu	1.662	1.214	448	73,04

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber- Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.02.1011	Nungga	1.289	944	345	73,24
52.72.02.1018	Kodo	1.109	797	312	71,87
52.72.02.1019	Oi Fo'o	1.221	883	338	72,32
52.72.02.1020	Lelamase	1.176	839	337	71,34
52.72.02.1021	Oimbo	899	793	106	88,21
52.72.03	Asakota	17.327	13.891	3.436	80,17
52.72.03.1001	Melayu	2.473	1.868	605	75,54
52.72.03.1002	Jatiwangi	3.558	3.036	522	85,33
52.72.03.1003	Jatibaru	2.970	2.121	849	71,41
52.72.03.1004	Kolo	2.957	2.148	809	72,64
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	2.171	1.783	388	82,13
52.72.03.1006	Ule	3.198	2.935	263	91,78
52.72.04	Raba	19.054	14.458	4.596	75,88
52.72.04.1001	Penaraga	2.241	1.666	575	74,34
52.72.04.1002	Rontu	1.570	1.213	357	77,26
52.72.04.1003	Penanae	1.952	1.450	502	74,28
52.72.04.1004	Kendo	839	634	205	75,57
52.72.04.1005	Ntobo	2.047	1.538	509	75,13
52.72.04.1006	Nitu	844	591	253	70,02
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.889	1.493	396	79,04
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.800	1.258	542	69,89
52.72.04.1009	Rite	1.192	914	278	76,68
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	2.476	1.914	562	77,30
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	2.204	1.787	417	81,08

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Kawin			
		Penduduk ber- Status Kawin	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.05	<i>Mpunda</i>	15.700	12.213	3.487	77,79
52.72.05.1001	Monggonao	1.870	1.505	365	80,48
52.72.05.1002	Sadia	1.752	1.371	381	78,25
52.72.05.1003	Santi	1.303	1.004	299	77,05
52.72.05.1004	Sambinae	1.773	1.353	420	76,31
52.72.05.1005	Penatoi	2.070	1.654	416	79,90
52.72.05.1006	Lewirato	900	710	190	78,89
52.72.05.1007	Mande	1.308	988	320	75,54
52.72.05.1008	Panggi	1.341	1.102	239	82,18
52.72.05.1009	Manggemaci	1.928	1.451	477	75,26
52.72.05.1010	Matakando	1.455	1.075	380	73,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

4. Akta Perceraian

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah Akta Perceraian. Bila Akta Perkawinan non-muslim dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama.

Tabel VI.7 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Akta Perceraian per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Cerai			
		Penduduk ber- Status Cerai	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	Kota Bima	4.260	3.134	1.126	73,57
52.72.01	Rasanae Barat	1.034	726	308	70,21
52.72.01.1001	Paruga	189	136	53	71,96
52.72.01.1002	Nae	128	87	41	67,97
52.72.01.1003	Sarae	162	115	47	70,99
52.72.01.1004	Tanjung	227	163	64	71,81
52.72.01.1013	Pane	118	75	43	63,56
52.72.01.1014	Dara	210	150	60	71,43
52.72.02	Rasanae Timur	440	318	122	72,27
52.72.02.1004	Kumbe	122	89	33	72,95
52.72.02.1008	Lampe	29	24	5	82,76
52.72.02.1009	Dodu	75	52	23	69,33
52.72.02.1011	Nungga	42	30	12	71,43
52.72.02.1018	Kodo	41	30	11	73,17
52.72.02.1019	Oi Fo'o	30	20	10	66,67
52.72.02.1020	Lelamase	21	12	9	57,14
52.72.02.1021	Oimbo	80	61	19	76,25
52.72.03	Asakota	876	664	212	75,80
52.72.03.1001	Melayu	161	118	43	73,29
52.72.03.1002	Jatiwangi	167	137	30	82,04
52.72.03.1003	Jatibaru	153	126	27	82,35
52.72.03.1004	Kolo	137	82	55	59,85
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	115	92	23	80,00
52.72.03.1006	Ule	143	109	34	76,22

Kode	Wilayah	Kepemilikan Akta Cerai			
		Penduduk ber- Status Cerai	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.04	Raba	1.056	764	292	72,35
52.72.04.1001	Penaraga	153	102	51	66,67
52.72.04.1002	Rontu	105	79	26	75,24
52.72.04.1003	Penanae	112	84	28	75,00
52.72.04.1004	Kendo	41	31	10	75,61
52.72.04.1005	Ntobo	78	64	14	82,05
52.72.04.1006	Nitu	28	23	5	82,14
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	97	63	34	64,95
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	102	73	29	71,57
52.72.04.1009	Rite	55	38	17	69,09
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	155	115	40	74,19
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	130	92	38	70,77
52.72.05	Mpunda	854	662	192	77,52
52.72.05.1001	Monggonao	96	73	23	76,04
52.72.05.1002	Sadia	87	73	14	83,91
52.72.05.1003	Santi	59	41	18	69,49
52.72.05.1004	Sambinae	76	59	17	77,63
52.72.05.1005	Penatoi	150	111	39	74,00
52.72.05.1006	Lewirato	52	42	10	80,77
52.72.05.1007	Mande	82	67	15	81,71
52.72.05.1008	Panggi	70	54	16	77,14
52.72.05.1009	Manggemaci	121	96	25	79,34
52.72.05.1010	Matakando	61	46	15	75,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

Dari tabel VI.7 dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki akta perceraian 3.134 orang (73,57 %) dari jumlah penduduk berstatus cerai hidup 4.260 orang. Persentase kepemilikan akta perceraian tertinggi berada di Kecamatan Mpunda sebanyak 77,52 persen dan terendah di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 70,21 persen.

D. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

Jumlah kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Pencatatan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak ini merupakan kesadaran masyarakat untuk mengurus dasar legalitas peristiwa yang berdampak pada hak keperdataan anak dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

Tabel VI.8 Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan & Pengangkatan Anak

No	Peristiwa	Jumlah Pencatatan
1	Pengakuan Anak	0
2	Pengesahan Anak	7
3	Pengangkatan Anak	3
4	Perubahan Nama	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024

E. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan untuk anak usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari. Adapun kepemilikan KIA pada tahun 2023 di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel VI.9 berikut ini. Sesuai dengan program pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan maka pada tahap awal Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bima ditargetkan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk tahapan berikutnya baru ditargetkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang direncanakan antara lain sebagai salah satu bukti diri, sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, transaksi keuangan di perbankan, dll.

Di Kota Bima ada fasilitas dari mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima dan diikat dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU), memperoleh discount/potongan harga tertentu sesuai MOU masing-masing. Jumlah mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima sejumlah 3 mitra:

1. Outdoormu Adventure Store
2. Kolam Renang Bima Tirta
3. Bimbingan Belajar Prime Generation Cabang Kota Bima
4. Global Mart Kota Bima

Jika dilihat pada tabel VI.9 di bawah ini total kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Bima sebanyak 31.570 anak atau setara dengan 64,75 persen. Capaian persentase tertinggi berada pada kecamatan Raba sebesar 71,18 persen (8.349 anak) dan capaian persentase terendah jatuh pada Kecamatan Rasanae Barat yakni sebesar 59,85 persen atau setara dengan 5.391 anak dari 9.008 anak wajib KIA.

Tabel VI.10 Jumlah dan Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Kelurahan

Kode	Wilayah	Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
		Wajib KIA	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72	Kota Bima	48.760	31.570	17.190	64,75
52.72.01	Rasanae Barat	9.008	5.391	3.617	59,85
52.72.01.1001	Paruga	1.485	916	569	61,68
52.72.01.1002	Nae	1.202	741	461	61,65
52.72.01.1003	Sarae	1.495	875	620	58,53
52.72.01.1004	Tanjung	1.978	1.004	974	50,76
52.72.01.1013	Pane	735	511	224	69,52
52.72.01.1014	Dara	2.113	1.344	769	63,61
52.72.02	Rasanae Timur	5.911	3.852	2.059	65,17
52.72.02.1004	Kumbe	1.117	702	415	62,85
52.72.02.1008	Lampe	505	426	79	84,36
52.72.02.1009	Dodu	988	544	444	55,06
52.72.02.1011	Nungga	787	531	256	67,47
52.72.02.1018	Kodo	637	460	177	72,21
52.72.02.1019	Oi Fo'o	745	527	218	70,74
52.72.02.1020	Lelamase	610	386	224	63,28
52.72.02.1021	Oimbo	522	276	246	52,87
52.72.03	Asakota	11.891	7.239	4.652	60,88
52.72.03.1001	Melayu	1.838	1.077	761	58,60
52.72.03.1002	Jatiwangi	2.405	1.365	1.040	56,76
52.72.03.1003	Jatibaru	1.874	1.165	709	62,17
52.72.03.1004	Kolo	2.023	1.217	806	60,16
52.72.03.1005	Jatibaru Timur	1.200	813	387	67,75
52.72.03.1006	Ule	2.551	1.602	949	62,80

Kode	Wilayah	Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
		Wajib KIA	Memiliki	Belum Memiliki	%
52.72.04	Raba	11.730	8.349	3.381	71,18
52.72.04.1001	Penaraga	1.532	1.028	504	67,10
52.72.04.1002	Rontu	1.026	687	339	66,96
52.72.04.1003	Penanae	1.283	966	317	75,29
52.72.04.1004	Kendo	477	356	121	74,63
52.72.04.1005	Ntobo	1.130	836	294	73,98
52.72.04.1006	Nitu	469	345	124	73,56
52.72.04.1007	Rabangodu Selatan	1.210	847	363	70,00
52.72.04.1008	Rabadompu Timur	1.037	735	302	70,88
52.72.04.1009	Rite	742	542	200	73,05
52.72.04.1010	Rabadompu Barat	1.493	1.102	391	73,81
52.72.04.1011	Rabangodu Utara	1.331	905	426	67,99
52.72.05	Mpunda	10.220	6.739	3.481	65,94
52.72.05.1001	Monggonao	1.130	708	422	62,65
52.72.05.1002	Sadia	1.082	775	307	71,63
52.72.05.1003	Santi	905	618	287	68,29
52.72.05.1004	Sambinae	1.127	694	433	61,58
52.72.05.1005	Penatoi	1.504	869	635	57,78
52.72.05.1006	Lewirato	550	381	169	69,27
52.72.05.1007	Mande	895	546	349	61,01
52.72.05.1008	Panggi	779	550	229	70,60
52.72.05.1009	Manggemaci	1.265	916	349	72,41
52.72.05.1010	Matakando	983	682	301	69,38

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024, diolah.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Data kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan berkelanjutan. Dinamika penduduk yang tinggi, menjadikan data sebagai sumber data harus terus di *update*. Pembangunan yang berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

A. Kesimpulan

1. Aspek Kuantitas

- a. Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus, dan luas wilayah Kota Bima tetap. Data terbaru luas wilayah tetap yaitu 222,25 km².
- b. Meskipun secara nasional jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, namun proporsi jumlah penduduk Kota Bima jenis kelamin perempuan lebih besar dari laki-laki, hal ini berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan *Gender*, Indeks Pemberdayaan *Gender* dan Indeks Kesenjangan *Gender*. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, mengindikasikan jumlah kepala keluarga perempuan pada usia lanjut akan cenderung lebih besar. Kelompok perempuan kepala keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah, maka diperlukan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok ini.

- c. Pada tahun 2024 ini Kota Bima sudah mengalami “Bonus Demografi” yaitu dimana jumlah penduduk yang produktif lebih besar dari usia non produktif. Usia produktif di Kota Bima mencapai 67,82 %, hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kondisi ini, dapat dijadikan peluang bagi daerah untuk memajukan kesejahteraan warganya dengan syarat masyarakat usia produktif ini memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM baik pendidikan & pelatihan, kesehatan, kemampuan komunikasi hingga penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan pekerjaan perlu didukung semua *stakeholder* daerah sehingga kelompok umur produktif ini dapat tertampung dalam pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
- d. Kepala Keluarga yang mempunyai status pekerjaan belum/tidak bekerja berjumlah 3.857 KK, padahal kepala keluarga sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan mencari pendapatan keluarga. Kelompok ini hendaknya dijadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah, agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial lainnya.

2. Aspek Kualitas

- a. Angka kematian bayi di Kota Bima tahun 2024 sebesar 10,73 yang berarti terjadi kematian bayi sebanyak 11 bayi per seribu kelahiran hidup. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi, maka oleh karena itu peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, dan pendekatan perilaku hidup sehat harus tetap ditingkatkan.
- b. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Bima yang tercatat dalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima berjumlah 568 jiwa, meskipun hanya 0,34 % dari jumlah penduduk tetap perlu adanya kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan pemerintah daerah, dengan harapan kelompok disabilitas ini agar tetap bisa bersosialisasi seperti warga normal lainnya. Perlu diperhatikan bahwa data tersebut adalah jumlah penyandang disabilitas yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima,

- c. Penyebab perceraian penduduk yang terbesar karena pertengkar dan perselisihan. Hal tersebut diperlukan kebijakan dan sosialisasi agar kesadaran kehidupan berumah tangga meningkat sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Bima terus ditingkatkan dengan pelayanan jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga warga merasa tenang dan nyaman secara hukum dan keperdataan. Hal tersebut menjadi tantangan bersama yang memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan warga sendiri. Masyarakat harus diedukasi tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi dan ter *update*, sehingga pendokumentasian data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib. Aparatur SDM instansi pelaksana data kependudukan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian verifikasi formulir agar konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2024 sebesar 100 %, akan tetapi yang tercetak hanya 99,54%. Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Kevalidan dan *updating* data dalam Kartu Keluarga ini sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Hal tersebut menjadikan kebijakan yang diambil tepat dan menyasar kepada masyarakat.
- b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran terutama usia 17 tahun ke atas dan Kartu Identitas Anak (KIA), masih diperlukan dan dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik.

- c. Program peningkatan pencatatan dokumen kependudukan untuk akta kematian dan akta kelahiran yang diperluas untuk semua umur diharapkan berhasil meningkatkan pemahaman arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kesadaran warga masyarakat.

4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan

Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan daerah berwawasan kependudukan di Kota Bima :

- a. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya *updating* data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *updating* data dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang *update* dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan. Setiap ada peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dilaporkan, maka data akan semakin valid, akurat sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran
- b. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem yang mutakhir terintegrasi, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal (milik instansi vertikal) dapat *update* secara langsung.
- c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk semua penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal, diperlukan kebijakan dan kerja sama dengan OPD/instansi/kelurahan/PKK/Sekolah dan pihak swasta sehingga cakupan akta kelahiran dan KIA untuk semua penduduk Kota Bima juga meningkat.

d. Koordinasi antar lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data diperlukan peningkatan secara terus-menerus. Pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Kementerian Agama), pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Kementerian Hukum & HAM, pelayanan KK-KTP dan akta belum terkoneksi seluruhnya.

B. Implikasi Kebijakan

1. Kebijakan validasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perlu pengoptimalan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi dan validitas data. Dukungan data dari dinas/OPD lain sangat dibutuhkan agar akurasi dan kelengkapan data dapat tersaji dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dan pihak pengambil kebijakan yang berkepentingan dengan data kependudukan.

2. Kebijakan penataan ruang dan penyediaan sarana prasarana berwawasan kependudukan

Terkait perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang dan distribusi kepadatan penduduk sekiranya harus ada lebih banyak kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana prasarana kebutuhan warga kota baik sarana prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Proyeksi proporsi dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dijadikan rujukan perencanaan daya tampung dan daya dukung wilayah.

3. Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan

Perkiraan pertambahan dan pengurangan penduduk dapat dijadikan acuan dalam kebijakan penyediaan pangan dan sumber kebutuhan energi daerah.

4. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kota Bima sudah mengalami “Bonus Demografi”. Hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena hal ini dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus tepat sehingga masa “Bonus Demografi” yang sedang berjalan dapat termanfaatkan dengan baik.

5. Kebijakan di bidang Sosial

Penduduk yang menyandang disabilitas, keluarga miskin, perceraian dan perempuan sebagai kepala rumah tangga dapat dijadikan pertimbangan penyusunan kebijakan penanganan masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat. Disabilitas, status sosial ini memerlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga tetap dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

